



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)  
KEPANJEN - MALANG 65163





## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang

Jawa Timur 65163

(0341) 399192. (0341) 399194

pa.kab.malang@gmail.com | [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)







## Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari 1997 - sekarang



Drs. H. Abu Umar, S.H.  
1997-2001



Drs. H. Bambang Ali Muhajir  
2001-2004



H. Munardi, S.H.  
2004-2007



M. Hasjim, S.H.  
2007-2009



Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum  
2010-2012



Drs. Bambang Supriatoto, S.H., M.H.  
2012-2017



Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.  
2017-2019



Drs. Mujib, M.H.  
2019-2020



Drs. Santoso, M.H.  
2020-2021



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.  
2021-2023



Drs. H. Misbah, M.H.I.  
2023 - sekarang





## Drs. H. Misbah, M.H.I.

### Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

---

Lahir di Sumenep, 03 Desember 1965. Dilantik menjadi Hakim sejak tahun 1998 dan terpilih menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak tahun 2023 menggantikan Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. Sebelum menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Drs. H. Misbah, M.H.I. menjabat sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Palopo (2016), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene (2017), Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (2019), Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep (2019), Ketua Pengadilan Agama Sumenep (2020), Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang (2020) dan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dari tahun 2021 sampai tahun 2023.





**Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**  
**Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

---

Lahir di Surabaya, 07 Agustus 1974. Dilantik menjadi Hakim sejak tahun 2007 dan terpilih menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak tahun 2022. Sebelum menjabat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru (2018), Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (2019), Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto (2020) dan Ketua Pengadilan Agama Mojokerto mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.



# HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

---



Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.



Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum



Dra. Hj. Masrifah, M.H.



Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.



Drs. Abd. Rouf, M.H.



Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.



Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S



Drs. A. Bashori, M.A.



Sutaji, S.H., M.H.





Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.  
Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
2020 - sekarang





Buyung Tumanggor, S.Kom

Plt Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
2023 - sekarang

## PANITERA MUDA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

---



Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.  
Panitera Muda Hukum



Idha Nur Habibah, S.H., M.H.  
Panitera Muda Gugatan



Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.  
Panitera Muda Permohonan

## KEPALA SUB BAGIAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

---



Buyung Tumanggor, S.Kom.  
Kasubbag Umum dan Keuangan



Junaidi Syampurno, S.H.  
Kasubbag Perencanaan,  
Teknologi Informasi dan Pelaporan



Khusnul Aini, S.H., M.H.  
Kasubbag Kepegawaian,  
Organisasi dan Tata Laksana



# PERISTIWA PENTING 2023

## Januari



### Pengadilan Agama Kabupaten Malang Meraih Hattrick Juara Umum

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara Umum selama tiga kali berturut-turut pada PTA Awards. Selain itu PA Kab Malang juga meraih beberapa juara yakni:

- Juara 3 kinerja perkara melalui Aplikasi SIPP
- Juara 1 E-Court Tingkat Pertama
- Juara 1 Kinerja Pelayanan Pemanfaat Gugatan Mandiri
- Juara 1 Implementasi 5R1N pada Satuan Kerja
- Juara 3 Upaya Hukum Banding
- Juara 2 Kinerja E-K keuangan Perkara
- Juara Umum Kinerja Terbaik 2022

## Februari

### Kunjungan Menteri PANRB di PA Kab. Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan kunjungan dari Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) – Bapak Abdullah Azwar Anas. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka kunjungan mendadak satuan Kerja yang memperoleh predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB.





Maret



### PA Kab. Malang Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Bupati Malang

PA Kab Malang melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara PA Kab Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Malang – Drs. H. Sanusi, M.M., Ketua Pengadilan Agama Se-Koordinator Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Pejabat, Kepala Dinas, dan Kepala Badan Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang.

April

### Ramadhan Penuh Berkah Bersama PA Kab. Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan sosial yang diikuti oleh seluruh pegawai dimulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh karyawan/karyawati PA Kabupaten Malang tak terkecuali. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Ibu-ibu anggota Dharmayukti Karini PA Kabupaten Malang





# PERISTIWA PENTING 2023

Mei



## Halal Bi Halal Keluarga Besar PA Kab Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan Halal Bi Halal yang diselenggarakan di Hotel Grand Kanjuruhan Kepanjen dan dihadiri oleh seluruh pegawai dan para pensiunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Karyawan/Karyawati. Turut hadir pada kegiatan tersebut pegawai purna PA Kab. Malang serta Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini PA Kab Malang

Juni

PA Kab Malang Laksanakan Sidang Terpadu Diluar Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan Sidang Terpadu Diluar Gedung Pengadilan dan Sidang Istbat bertempat di Balai Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua PA Kab. Malang – Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. Hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Malang, Camat Sumbermanjing Wetan, Kementerian Agama dan Perwakilan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.





Juli



### PA Kab Malang Hadir di Mall Pelayanan Publik

PA Kab Malang kini hadir di Mall Pelayanan Publik setelah diresmikan langsung secara serentak bersama dengan 5 MPP di Jawa Timur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) - Abdullah Azwar Anas secara virtual dari Tulungagung. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Ketua PA Kab. Malang – Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. dan Sekretaris PA Kab. Malang – H. Maulana Musa Sugi Alam, S.H. bersama Wakil Bupati Malang - Drs. Didik Gatot Subroto, SH., M.H.

Agustus

### PA Kab Malang Melaksanakan Desk Evaluasi Zona Integritas

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti Desk Evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Penilaian Internal (TP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemaparan materi Desk Evaluasi Zona Integritas disampaikan oleh Ketua PA Kab. Malang – Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. selaku Pembina Zona Integritas didampingi oleh Wakil Ketua PA Kab. Malang – Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. selaku ketua Zona Integritas beserta seluruh Koordinator Area Zona Integritas.





# PERISTIWA PENTING 2023

September



## Kenal Sambut Ketua PA Kab Malang yang Baru

Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan Kenal Sambut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang – Drs. H. Misbah, M.H.I. yang sebelumnya menjabat menjadi Ketua PA Malang Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Samara Resort & Hotel, Batu. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Aparatur PA Kab. Malang.

Oktober

## Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Zona Integritas PA Kab Malang

PA Kab Malang mendapatkan kunjungan dari Tim Penilai Internal Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Lapangan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Tim dari TPI Mahkamah Agung disambut langsung oleh Ketua PA Kab. Malang – Drs. H. Misbah, M.H.I. Kegiatan tersebut bermaksud untuk melaksanakan verifikasi lapangan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada PA Kab Malang





## November



### PA Kab Malang Raih Peringkat Terbaik SIPP dan Pengelolaan Banding

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih juara SIPP dan Pengelolaan Banding pada PTA Awards. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Puri Perdana, Blitar. Ketua PA Kab. Malang - Drs. H. Misbah, M.H.I. dan Wakil Ketua PA Kab. Malang - Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. menerima penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H. Prestasi tersebut merupakan salah satu bukti komitmen PA Kab. Malang menjadi Sang Juara.

## Desember

### PA Kab Malang Terima Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Ketua PA Kab. Malang - Drs. H. Misbah, M.H.I didampingi oleh Plt. Sekretaris PA Kab. Malang - Buyung Tumanggor, S.Kom menerima penghargaan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Bertempat di Balai Rung Mahkamah Agung RI - Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI - Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.





## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 ini dengan baik dan tepat waktu.

Tak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang turut serta membantu dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 sehingga dapat terselesaikan secara paripurna.

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini tentu masih ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan dari semua pihak guna sempurnanya penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini bermanfaat bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya serta merupakan sarana evaluasi dalam menentukan kebijakan kedepan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dapat menjadi sarana pembelajaran maupun penelitian baik bagi para peneliti ataupun Mahasiswa yang tengah menyelesaikan studinya.

Kepanjen, 31 Desember 2023

**Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang**



**Drs. H. Misbah, M.H.I.**

**NIP. 19651203.199003.1.001**

**DAFTAR ISI**

<b>Sekapur Sirih .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I   Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II   Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan</b>	
<b>Keadaan Perkara .....</b>	<b>22</b>
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum /Agama /Miltun .....	22
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	22
- Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	23
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	23
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	
B. Penyelesaian Perkara .....	24
- Jumlah sisa perkara yang diputus .....	24
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....	25
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK .....	27
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi .....	28
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	29
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) .....	29
- Sidang keliling / pelayanan terpadu .....	30
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) .....	30
<b>BAB III   Sumber Daya Manusia</b>	
<b>Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan /golongan /pendidikan ..</b>	<b>32</b>



- Mutasi .....	33
- Promosi .....	34
- Pensiun .....	34
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) .....	34
<b>BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi</b>	
A. Pengelolaan Keuangan .....	37
B. Pengelolaan Sarana dan Prasana .....	42
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	49
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan .....	49
Umum / Agama /Miltun .....	49
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan .....	51
Umum /Agama /Miltun .....	51
<b>BAB V Peningkatan Pelayanan Publik</b>	
- Akreditasi Penjaminan Mutu .....	54
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	56
- Inovasi Pelayanan Publik .....	57
<b>BAB VI Pengawasan</b>	
A. Internal .....	65
B. Evaluasi .....	68
<b>BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	73
C. Penutup.....	74

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Data Jenis Perkara Yang Diterima Tahun 2023
Lampiran 2	: Data Jenis Perkara Yang Diputus Tahun 2023
Lampiran 3	: Data Jenis Perkara Tundaan Tahun 2023
Lampiran 4	: Data Perkara Yang Belum Diminutasi
Lampiran 5	: Putusan Yang Diajukan Banding
Lampiran 6	: Perkara Yang Diajukan Kasasi
Lampiran 7	: Perkara Yang Diajukan Peninjauan Kembali
Lampiran 8	: Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2023
Lampiran 9	: Rekapitulasi Layanan Posbakum 2023
Lampiran 10	: Statistik PNS
Lampiran 11	: Statistik Tenaga Honorer
Lampiran 12	: Mutasi Kenaikan Pangkat
Lampiran 13	: Mutasi kenaikan gaji berkala
Lampiran 14	: Daftar Mutasi Pegawai masuk
Lampiran 15	: Daftar Mutasi Pegawai keluar
Lampiran 16	: Daftar Cuti Pegawai
Lampiran 17	: Promosi Pegawai
Lampiran 18	: Daftar Pensiun Pegawai
Lampiran 19	: Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial
Lampiran 20	: Data Tenaga Teknik Yudisial
Lampiran 21	: Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial
Lampiran 22	: Data Tenaga Non Teknis
Lampiran 23	: Rincian Belanja Pegawai
Lampiran 24	: Rincian Belanja Barang
Lampiran 25	: Rincian Belanja Modal
Lampiran 26	: Rincian PNPB DIPA 01 Tahun 2023
Lampiran 27	: Rincian DIPA 04 Tahun 2023
Lampiran 28	: Rincian PNPB DIPA 04 Tahun 2023
Lampiran 29	: Matrik Barang Inventaris
Lampiran 30	: Data Surat Masuk Tahun 2023
Lampiran 31	: Data Surat Keluar Tahun 2023





## BAB I

# PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia mempunyai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai pilar *pertama* yang merupakan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, kemudian pilar *kedua* adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi dasar Negara Indonesia. Pilar *ketiga*, adalah NKRI, bahwa Republik Indonesia kuat karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan pilar *keempat* atau yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Empat pilar tersebut merupakan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam masyarakat.

Pemisahan kekuasaan negara yang digunakan menganut konsep trias politika yang berarti ada tiga (3) tonggak kekuasaan yang sejajar dan beriringan dalam membangun NKRI yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

- a. Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
- b. Legislatif adalah membuat undang-undang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- c. Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang yaitu ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Kekuasaan Yudikatif atau yang kemudian jamak dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman berkewajiban untuk mempertahankan Undang-undang (UU) dan berhak untuk memberikan Peradilan secara berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sejak era reformasi hingga sekarang terdapat banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan, baik kultur demokrasinya, sistem pemilu, maupun pembagian kekuasaan. Pada Kekuasaan Yudikatif, perubahan yang paling mendasar dalam sistem Peradilan adalah penyatuatapan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI Reformasi di bidang Peradilan tersebut diawali pada Amandemen ke-3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945,



Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi : *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, dan pada ayat (2) berbunyi : *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, *“Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 berbunyi, *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”*. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa *“Ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing - masing”*. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahir lah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berlakunya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membuat tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut, tentu membawa konsekuensi logis terhadap

pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan baik dari sisi administratif, personil (SDM), finansial maupun sarana dan prasarana.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Hukum Kabupaten Malang. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

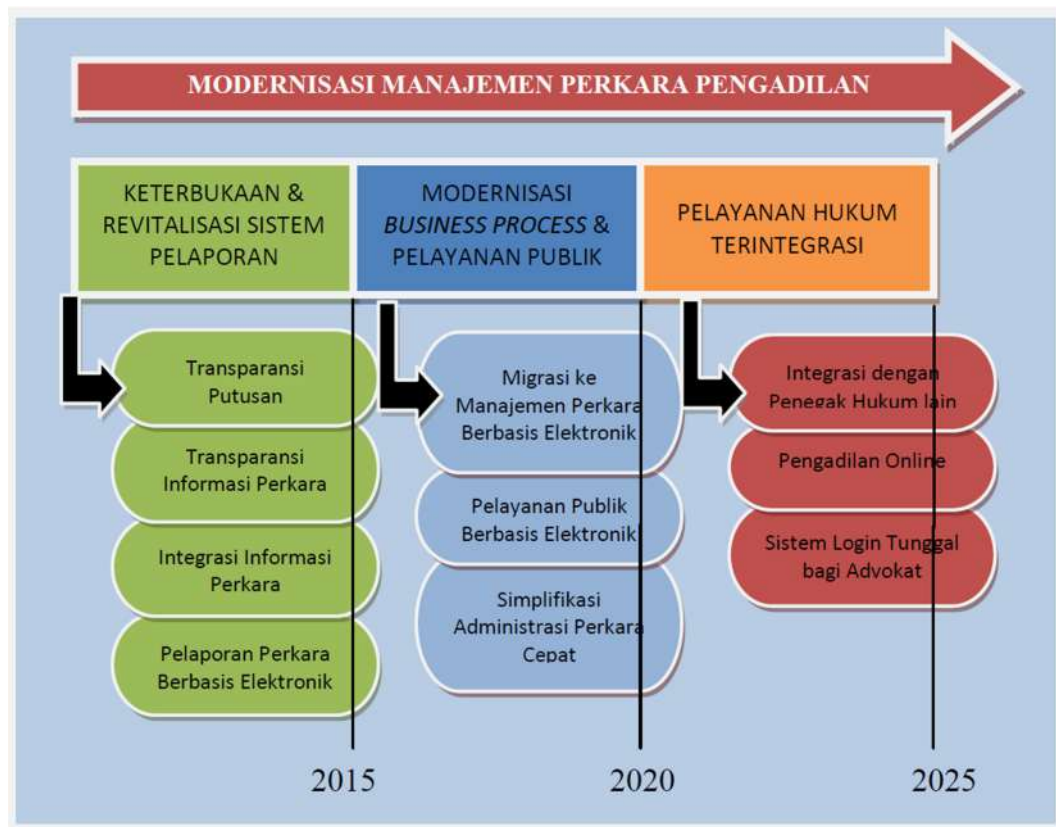
Program dan kebijakan Mahkamah Agung tersebut dituangkan kedalam Cetak biru (Blue Print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra) Tahun 2020-2024 yang merupakan tolak ukur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, administrasi perkara, arah kebijakan strategis berikut rencana strategis dan pengelolaan anggaran APBN serta penyediaan sarana prasarana, inovasi-inovasi serta prestasi-prestasi yang dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ketua Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut guna penyempurnaan di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya serta masyarakat umum dan akademisi. Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2023 secara rinci akan terurai dalam bab-bab selanjutnya.



## A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pelayanan Hukum Terintegrasi adalah program prioritas Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 untuk kurun waktu 5 tahun ketiga antara tahun 2022-2025.



Area tersebut menjadi penting dalam mencapai pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan mengingat setelah berhasil pada etape pertama dan kedua yakni fase Keterbukaan dan Revitalisasi Sistem Pelaporan dan fase Modernisasi Business Process dan Pelayanan Publik, maka Peradilan Agama terus melakukan pembaruan kearah yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yakni menjadi Peradilan yang modern dan mampu memberikan Pelayanan Hukum terintegrasi kepada para pihak berperkara dengan mengintegrasikan layanan dengan Penegak Hukum lain, adanya Pengadilan online serta Sistem Login Tunggal bagi Advokat atau dikenal dengan Sistem SSO (Single Sign On) seiring telah terciptanya sebuah system Manajemen perkara berbasis elektronik (*e-court*), Ruang Sidang Elektronik dan Pelayanan Hukum Terpadu.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya menjadi *agent of change* (agen perubahan) telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam sistem Peradilan dengan meningkatkan kualitas Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama (setara ISO 9001:2015) dengan cakupan 7 (tujuh) kriteria *Indonesian Court Performance (-) Excellent* (ICP-E) yakni Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Sistem Dokumen, Manajemen Sumberdaya, Manajemen Proses dan Hasil Kinerja. Dalam mempertahankan sertifikasi Akreditasi ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula mendapatkan audit eksternal dari Komisi Akreditasi Nasional Badilag pada bulan November 2021 dan telah pula merampungkan hasil dari surveillance eksternal tersebut dengan membenahi beberapa dokumen kerja yang telah dibuat sebelumnya, dengan harapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan berhasil mempertahankan Akreditasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan penancangan pembangunan Zona Integritas dan bertindak sebagai pelopor instansi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang bersama-sama dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Kepolisian Resort Kepanjen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang di Tahun 2018 yang lalu.

Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM ini penting dilakukan mengingat didalamnya mengandung unsur-unsur penguat terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi. Adanya proses transparansi yang selalu ditunggu - tunggu oleh masyarakat pencari keadilan juga menjadi kata kunci dalam pembangunan Zona Integritas tersebut. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat ditunaikan secara transparan oleh lembaga Peradilan dalam sinergi terhadap reformasi birokrasi sehingga dengan demikian para pencari keadilan dapat lebih mengetahui secara detail tentang perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya.



Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi kepada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan, Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Termasuk di dalamnya beberapa keputusan setingkat Dirjen yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, khususnya Peradilan Agama semakin menguat dalam beberapa dekade namun upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan harus terus berjalan. Berangkat dari ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menindaklanjuti dengan menerapkan *Standard Operational Prosedure (SOP)* sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/113/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang SOP dengan beberapa turunan pengganti untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, maka aparatur Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tupoksinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya melakukan terobosan guna menciptakan pelayanan yang lebih mudah, efektif dan efisien serta terjangkau kepada seluruh masyarakat pencari keadilan. Terobosan dimaksud dapat melalui inovasi-inovasi terbaru untuk mempermudah pelayanan para pihak berperkara, dapat berupa perubahan roleplay / SOP di bidang pelayanan publik sehingga tercipta layanan yang cepat dan tepat sasaran maupun dengan melakukan kerjasama lintas sektoral. Ketua PA Kab. Malang mengadakan perjanjian kerjasama lintas sektoral dengan 4 (empat) instansi secara sekaligus, yakni Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (LP3M UB). Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) untuk mewujudkan Pengadilan yang inklusi. Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang dalam hal akses pertukaran informasi data secara valid terhadap pihak- pihak berperkara. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang untuk saling bersinergi dalam memberikan layanan pojok konseling.

Ketua PA Kab. Malang – Drs. H. Misbah, M.HI. telah berkomitmen dan mendeklarasikan diri bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Inklusif yaitu dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan gencarnya pembangunan sarana dan prasarana disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan diraihnya penghargaan pada bulan Februari 2021 dari Kemenpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020.





*Gambar 1. Piagam Penghargaan Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 dari Kemenpan RB*

Selain itu, layanan disabilitas yang gencar dibangun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama – Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag - Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H., Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya – H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. bersama tim dari Ditjen Badilag dan PTA Surabaya.



*Gambar 2. kika, Sekretaris PTA Surabaya, Panitera PTA Surabaya, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, Direktur Jenderal Badilag, Ketua PTA Surabaya, Ketua PA Kab Malang dan Wakil Ketua PA Kab. Malang saat peresmian Layanan Disabilitas di PA Kab. Malang.*

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan kabar gembira dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2022, PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA. Penghargaan tersebut ditayangkan pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.





Gambar 3. PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA

Pada tahun 2023 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan anugerah sebagai satuan kerja yang meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja tanggal 4 Desember 2023. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mendapatkan nilai total sejumlah 92,09 dan mendapatkan nilai tertinggi nomor 2 dari 60 Satuan Kerja. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan setelah sebelumnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang melewati berbagai tahapan dimulai dari seleksi administrasi, Desk Evaluation (analisis dokumen dan wawancara), validasi dan pengolahan survey, evaluasi lapangan hingga panel final dan clearance.



Gambar 4. PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Hal itu sudah sejalan dengan Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas



dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya pelayanan prima dan keterbukaan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara :

1. Memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang berada di luar Kabupaten Malang dengan Ruang Sidang Keliling dimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan DIPA TA 2023 untuk sidang keliling sebesar Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu delapan ratus ribu rupiah);
2. Mendukung kinerja pelayanan untuk para pencari keadilan dimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan tambahan anggaran DIPA TA 2023 sebesar Rp. 200.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan empat ratus ribu rupiah) untuk untuk renovasi atap ruang sidang;
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar sesuai SOP terutama pada area-area pelayanan publik baik Posbakum, Mediasi, ruang PTSP dan ruang Sidang;
4. Menempelkan pengumuman tentang Jadwal Antrian Sidang (Maskarebet) baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada website resmi Pengadilan;
5. Menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada website resmi Pengadilan;
6. Melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
7. Melakukan sosialisasi pendaftaran Perkara melalui E-Court Mahkamah Agung RI bagi Pengguna terdaftar lainnya setelah ditahun sebelumnya berhasil mensosialisasikan Pengguna Terdaftar (Advokat) agar berperkara melalui e-Court;
8. Dengan penyempurnaan terhadap perangkat kerja dan personil yang berada di area pelayanan publik PTSP serta membuat role play tentang disiplin dan tupoksi sehingga pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kab. Malang bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 2023;

9. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui website resmi Pengadilan dengan beberapa layanan yang efisien dan efektif seperti Telescop, Jadwal Sidang Maskarebet, Survey Online, Informasi Perkara serta tautan-tautan layanan Peradilan dan informasi Hukum yang memadai untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya;
10. Arema Plus, yakni Inovasi terkini yang dapat mengakses ruang tunggu secara mandiri dan aman dengan kartu Arema yang telah diberikan saat pendaftaran perkara;
11. Maskarebet, antrian sidang secara otomatis tanpa ribet yang terpublish pada website Pengadilan dan terpampang pada papan pengumuman;
12. Antrian PTSP, dengan media informasi perkara melalui TV Media yang tersedia di ruang tunggu PTSP;
13. Informasi perkara lainnya seperti bentangan poster, pamflet dan brosur;
14. Informasi perkara otomatis melalui SMS gateway dengan aplikasi SPS (system pengingat sidang) dan layanan lainnya seperti pengambilan Akta Cerai, pengambilan salinan putusan dll termasuk didalamnya Whatsapp dan Arema Plus Mobile untuk aplikasi smartphone;
15. Aplikasi ATR (Audio text to Recording), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas proses persidangan, yang mampu merekam seluruh pembicaraan yang ada dalam persidangan langsung dalam bentuk teks, dan dalam update terakhir, ATR telah mampu merekam gambar bergerak para pihak dan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam format suara (\*.webm) demi menjamin keterbukaan dan validitas data persidangan;
16. Adanya kotak saran sebagai upaya perbaikan yang komprehensif ataupun melalui online dengan cara mengirim pesan secara langsung kepada Petugas Meja Informasi;
17. Meja Informasi Online yang bisa diakses oleh para pihak berperkara untuk mengirim pesan kepada petugas meja informasi yang tersedia di website;
18. Sarana dan prasarana disabilitas yang dibangun di lingkungan kantor PA Kab. Malang untuk mempermudah para pihak berperkara penyandang disabilitas dalam berperkara;



19. Akurasi dan ketepatan waktu pelaksanaan Anggaran DIPA sehingga didapat output dan outcome secara maksimal sesuai ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Di samping hal-hal yang telah diupayakan di atas, dalam hal pelayanan publik dan persidangan, Pengadilan telah memiliki 2 (dua) SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yang masuk dalam Prolegnas yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun Non DIPA)
2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum,
3. Sidang Keliling turun ke daerah atau wilayah yang sulit dijangkau atau marjinal di Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI, sampai akhir tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanfaatkan dan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.3.1.

Di samping itu, agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif, telah ditunjuk petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 6419/KPA.W13-A35/HM.02.3/X/SK/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Susunan Tim Pengelola dan Inovasi Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja, maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/SK/2023 tanggal 26

September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”***.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni :

- a. **P**rofesional.
- b. **A**kuntabilitas.
- c. **S**antun.
- d. **T**ransparan.
- e. **I**novatif.
- f. **B**ermartabat
- g. **I**ntegritas.
- h. **S**emangat.

i. **A**manah.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut berada dalam 7 (tujuh) area yakni :

1. Area organisasi dan kepemimpinan.  
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management Pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.  
Adanya kebijakan-kebijakan Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.  
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.  
Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area kepuasan pencari keadilan.  
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan
6. Area keterjangkauan.  
Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.
7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan. Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pelayanan Publik



4. Pelayanan Meja Informasi
5. Pengawasan / Pengaduan
6. Pengelolaan website
7. Penguatan SIPP dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Di samping itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan 8 (delapan) Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan PerUndang - undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditunjang dengan aturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab

7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

### C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 4 (empat) rencana strategis yang tertuang pada RENSTRA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website ataupun yang berbasis *web server*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi Pengadilan.
4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia***, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. ***Membangun Budaya Kerja Profesional***, yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor :



071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juncto Perma Nomor 7 Tahun 2019 serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan memberikan penghargaan (*Reward*), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

3. ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***, yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, jadwal sidang, salinan putusan, juga yang berkaitan dengan organisasi Pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi lebih mudah dan murah. Di samping itu pula adanya *live chat* atau pesan singkat secara *online* telah pula diterapkan dalam *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjangkau pertanyaan-pertanyaan singkat oleh masyarakat pencari keadilan secara cepat dan mudah, Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparatur Pengadilan ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. ***Menjaga Kemandirian Badan Peradilan***, yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus

dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan***, yaitu tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan***, yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan

manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya - upaya tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan***, yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan Peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Badan Peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.





## BAB II

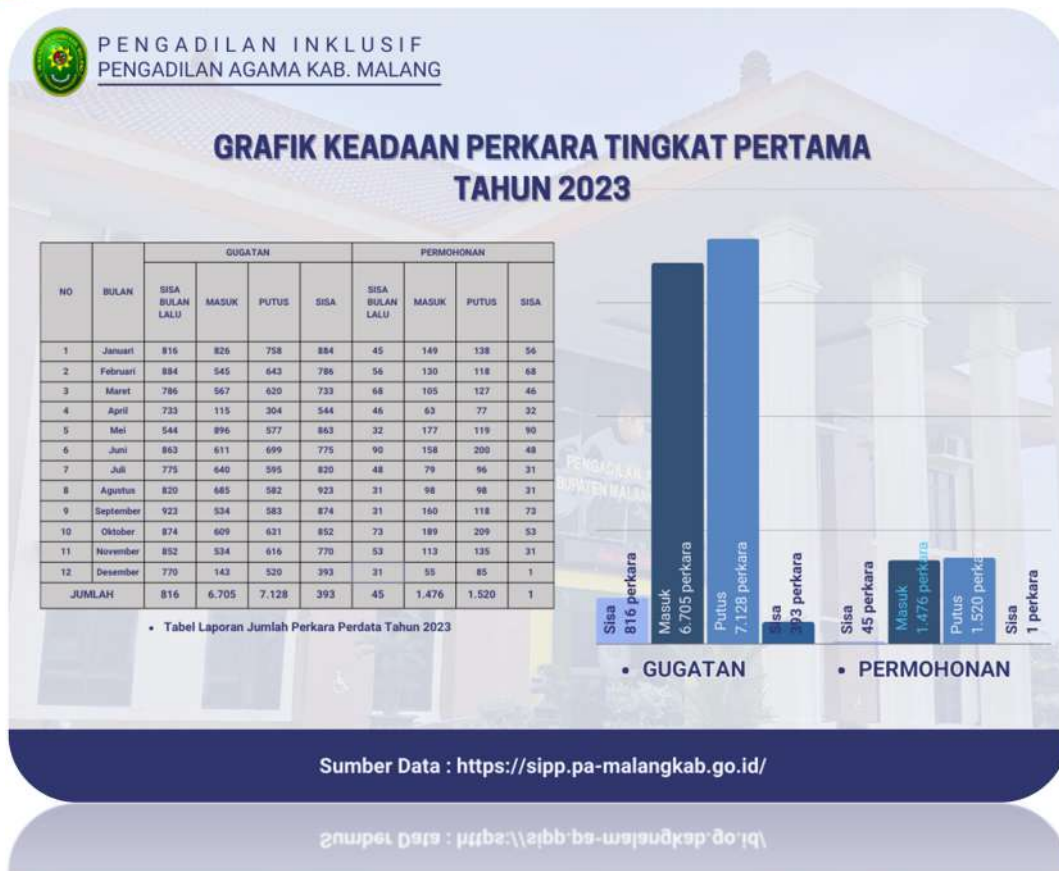
### KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

#### A. KEADAAN PERKARA

##### - Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 816 (delapan ratus enam belas) perkara dan perkara permohonan sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara. Pada tahun 2023 menerima perkara sejumlah 8.181 (delapan ribu seratus delapan puluh satu) perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 6.705 (enam ribu tujuh ratus lima) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1.476 (seribu empat ratus tujuh puluh enam) perkara. Sehingga total perkara yang ditangani sejumlah 9.042 (sembilan ribu empat puluh dua) perkara. Dari total perkara tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 telah memutuskan 8.648 (delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 7.128 (tujuh ribu seratus dua puluh delapan) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun ini sejumlah 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) perkara terdiri dari 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) perkara gugatan dan 1 (satu) perkara permohonan

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



#### - Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 11 (sebelas) perkara. Pada tahun 2023 telah menerima permohonan upaya hukum banding sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 29 (dua puluh sembilan) perkara sehingga terdapat sisa 3 (tiga) perkara dengan rincian 2 (dua) perkara telah terkirim dan 1 (satu) perkara masih dalam proses.

#### - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 mempunyai sisa perkara Kasasi yang belum selesai sejumlah 8 (delapan) perkara. Pada tahun 2023 telah menerima permohonan upaya hukum Kasasi sejumlah 8 (delapan) perkara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sejumlah 15 (lima belas) perkara sehingga terdapat sisa 1 (satu)



perkara, dengan rincian 1 (satu) perkara telah terkirim. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki sisa perkara Peninjauan Kembali yang belum selesai sejumlah 1 (satu) perkara dan pada tahun ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 5 (lima) perkara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sejumlah 4 (empat) perkara sehingga terdapat sisa 2 (dua) perkara, dengan rincian 1 (satu) perkara telah terkirim dan 1 (satu) perkara masih dalam proses.

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



## B. PENYELESAIAN PERKARA

### - Jumlah sisa perkara yang diputus

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 memiliki sisa perkara yang belum selesai sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 816 (delapan ratus enam belas) perkara dan perkara permohonan sebanyak 45 (empat puluh

lima) perkara. Dari jumlah sisa tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 dapat menyelesaikan 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara dan telah terselesaikan pada tahun ini, sedangkan sisa perkara yang diajukan banding tahun 2022 dan belum diputus pada tahun 2023 sebanyak 0 (nol) perkara, sisa perkara yang diajukan kasasi tahun 2022 dan belum diputus hingga tahun 2023 sebanyak 0 (nol) perkara serta sisa perkara yang dimohonkan PK tahun 2022 dan belum diputus hingga tahun 2023 sebanyak 0 (nol) perkara.

- **Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 816 (delapan ratus enam belas) perkara dan perkara permohonan sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara, sedang pada tahun 2023 menerima perkara sebanyak 8.181 (delapan ribu seratus delapan puluh satu) perkara yang terdiri dari 6.705 (enam ribu tujuh ratus lima) perkara gugatan dan 1.476 (seribu empat ratus tujuh puluh enam) perkara permohonan. Total keseluruhan jumlah perkara yang ditangani sebanyak 9.042 (sembilan ribu empat puluh dua) yang perkara terdiri dari 7.521 (tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) perkara gugatan dan 2.996 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) perkara permohonan. Pada tahun 2023, perkara yang diterima mengalami **penurunan** sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara atau 15% (lima belas persen) apabila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2022 yang diterima sebanyak 9.569 (sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan) perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2023 sebanyak 8.648 (delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) perkara dari 9.042 perkara atau 95,64% (sembilan puluh lima koma enam puluh empat persen) yang terdiri dari 7.521 (tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) perkara gugatan dan 2.996 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) perkara permohonan sebagaimana matrik terlampir, sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 394 (delapan ratus enam puluh

satu) perkara atau 4,36% (empat koma tiga puluh enam persen) terdiri dari 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) perkara gugatan dan 1 (satu) perkara permohonan, dengan demikian pada tahun 2023 rasio tunggakan (sisa perkara) 4,36% (empat koma tiga puluh enam persen) atau lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen).

Dari jumlah sisa perkara tahun 2022 ditambah perkara yang diterima pada tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menangani perkara sebanyak 9.042 (sembilan ribu empat puluh dua) dan telah memutus sebanyak 8.628 (delapan ribu enam ratus dua puluh delapan) perkara secara tepat waktu serta 20 (dua puluh) perkara tidak tepat waktu (diputus lebih dari 5 bulan) karena salah satu pihak ghoib, PNS dan anggota TNI/POLRI, sehingga jumlah seluruhnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebanyak 8.648 (delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) perkara.

Rincian jenis perkara yang diterima pada tahun 2023 terbaca pada **Lampiran 1**, rincian jenis perkara yang diputus pada tahun 2023 dapat dilihat pada dalam **Lampiran 2**, sedang sisa perkara tundaan menurut jenisnya ada pada **Lampiran 3** dan matrik terlampir.

Adapun perkara putus tahun 2023 sebanyak 8.648 (delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) perkara dan yang telah diminutasi sebanyak 8.648 (delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) perkara. perkara (100%), sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sebanyak 0 (nol) perkara (0%), sebagaimana (**Lampiran 4**) dan matrik terlampir.



Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



#### Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

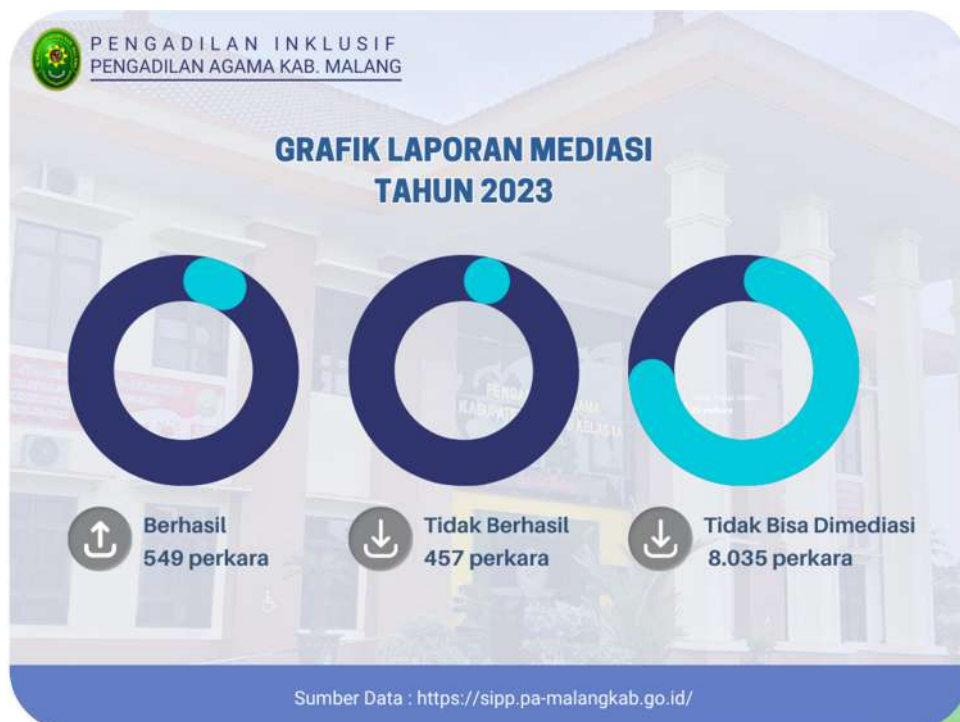
Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus 8.648 (delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) perkara dan dari jumlah perkara putus tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 11 (sebelas) perkara dan pada tahun 2023 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara dan 2 (dua) perkara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum banding 8.625 (delapan ribu enam ratus dua puluh lima) perkara atau 99,73% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga), sehingga dari 32 (tiga puluh dua) perkara yang mengajukan banding tersebut, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 (delapan) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 24 perkara 75% (tujuh puluh lima persen), kemudian dari jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada Pengadilan Agama

Kabupaten Malang sebanyak 16 perkara tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 11 (sebelas) perkara 68,75% (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) Sebagaimana (*Lampiran 5, 6 dan 7*).

- **Jumlah Perkara yang berhasil di mediasi**

Dari jumlah sisa perkara tahun 2022 sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara ditambah dengan penerimaan perkara pada tahun 2023 sebanyak 8.181 (delapan ribu seratus delapan puluh satu) perkara, jumlah perkara yang melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 sebanyak 1.006 (seribu enam) perkara atau 11,12% (sebelas koma dua belas persen) dan yang berhasil dimediasi sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan) perkara atau 6,07% (enam koma nol tujuh persen), sedangkan perkara yang gagal dimediasi dan tidak layak mediasi sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) perkara atau 5,05% (lima koma nol lima persen), perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 8.035 (delapan ribu tiga puluh lima) perkara 77,76% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh enam) sebagaimana (*Lampiran 8*).

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



### C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

#### - POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam membuat surat gugatan atau permohonan tersebut para pihak tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor W13-A35/0002/HK.05/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 untuk pelaksanaan Anggaran Posbakum DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terserap sebesar Rp99.974.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) jam layanan dan 6.700 (enam ribu tujuh ratus) pemohon bantuan hukum sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W13-A35/8125/PL.01/12/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Lembaga bantuan hukum ini sesuai perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti surat permohonan dan gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum



atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

- d. Bantuan sebagai pendamping atau kuasa khusus bagi salah satu pihak pencari keadilan dalam beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jam Layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah pada jam kerja yaitu pada hari Senin s.d Jum'at, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB atau sampai Pemohon bantuan hukum pada hari itu terlayani semua meskipun jam pelayanan Posbakum sudah selesai.

Jika ditilik dari jam layanan, maka Layanan Posbakum ini telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan yakni 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) jam layanan dengan hasil dilapangan sebesar 1.904 (seribu sembilan ratus empat) jam atau lebih 533 jam dengan jumlah perkara sebanyak 6.700 (enam ribu tujuh ratus) perkara. Hal ini karena telah adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan LKPH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu yang beracara di Pengadilan agar tetap melayani pemberian bantuan hukum/advis kepada para pihak hingga masa perjanjian berakhir.

Rekapitulasi jumlah layanan Posbakum selama tahun 2023 dapat dilihat pada (**Lampiran 9**) dengan grafik tertampil di bawah ini :



### - Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan anggaran dalam DIPA 2023 untuk pelaksanaan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu sebesar Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari kantor Pengadilan sehingga keberadaan Sidang Keliling tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah sehingga menyisakan anggaran senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

### - Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Jumlah Perkara Prodeo DIPA yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 mendapatkan anggaran dari DIPA Dirjen Badilag sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah. Jumlah perkara prodeo DIPA sejumlah 71 (tujuh puluh satu) perkara dan kesemuanya telah diselesaikan dengan baik dengan menyisakan anggaran Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Rekapitulasi Sidang Keliling dan Prodeo selama tahun 2023 dapat dilihat pada grafik tertampil di bawah ini :







## BAB III

# SUMBER DAYA MANUSIA

### A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem yang baik yang telah tercipta pada sebuah organisasi tidak akan berjalan baik apabila sumber daya manusianya tidak peduli dengan organisasi itu sendiri. Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada sebuah organisasi manapun amatlah penting dan menentukan, karena setiap SDM merupakan roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh organisasi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna, produktif dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda organisasi dimaksud. Oleh karena itu membina dan mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing menjadi sebuah keharusan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI selain mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah mengambil langkah konkrit yakni :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan Diklat dan/atau pelatihan yang diadakan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung RI terhadap SDM baik Teknis maupun Non Teknis;
- c. Mengadakan rapat dinas secara berkala dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan rapat dinas struktural secara berkala demi peningkatan mutu Pengadilan;
- e. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai untuk memutuskan memberikan promosi dan mutasi.
- h. Memberikan standar yang jelas dalam penyelesaian tugas-tugas di bidang organisasi dan tata laksana tak terkecuali mengenai pensiun pegawai/Hakim sehingga tercipta kepastian hukum bagi yang bersangkutan.

Adapun secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 berjumlah 42 (lima puluh satu) orang Hakim dan ASN serta dibantu oleh 21 (dua puluh) PPNN yang digaji oleh DIPA tahun anggaran 2023 seperti dijabarkan pada **Lampiran 10** (Statistik PNS) dan **Lampiran 11** (Statistik Tenaga PPNN).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal rekrutmen tidak mempunyai kewenangan, karena dalam hal ini rekrutmen menjadi wewenang / hak Mahkamah Agung RI.

### 1. Mutasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 9 (sembilan) pegawai, dan telah terealisasi 9 (sembilan) orang sebagaimana dalam **Lampiran 12**.
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 15 (lima belas) orang hakim dan pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana dalam **Lampiran 13**.
- c. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk tahun 2023 terdapat 2 (dua) hakim dan 4 (empat) orang pegawai mutasi masuk sebagaimana dalam **Lampiran 14** dan terdapat 2 (dua) hakim dan 7 (tujuh) orang pegawai mutasi keluar sebagaimana dalam **Lampiran 15**.
- d. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 Hakim dan Pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 42 orang, sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 16**.

## 2. Promosi

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 7 (tujuh) orang dari hakim dan pegawai promosi jabatan dalam **Lampiran 17**.

## 3. Pensiun

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dan sudah turun SK pensiunnya yaitu an. 1) Sutik sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 18**.

## 4. Diklat

### - Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Upaya peningkatan SDM Teknis Yudisial sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena baik Hakim dan Panitera merupakan tolak ukur dalam terselenggaranya penegakan hukum dan terwujudnya rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Dengan demikian, profesionalitas aparatur Teknis Yudisial menjadi keniscayaan. Peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan nurani (*morals*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) aparat pengadilan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur serta pengalaman kerja melalui mutasi terencana (baca : **Lampiran 19 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial**).

Dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah mahkamah agung dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya, maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung pada umumnya, dan Pengadilan Agama khususnya lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan wajah Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun SDM Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang



terdiri dari Hakim sebanyak 11 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 9 hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 12 orang, sedang Jurusita sebanyak 2 orang dan Jurusita Pengganti sebanyak 1 orang. (sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 20**). Adapun staf yang membantu administrasi di Kepaniteraan yaitu tenaga kontrak sebanyak 10 orang.

#### - Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial di sini adalah aparatur peradilan yang mengelola bidang organisasi dan tata laksana serta administrasi umum, sering di istilahkan dengan sebutan Sekretariat, dimana lingkup Sekretariat ini lebih luas dan bersifat umum. Sekretariat memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya *ke dalam* (mengenai tata kelola kepegawaian, keuangan atau gaji pegawai dan pengelolaan sarana prasarana untuk pegawai) dan juga *keluar* yang menyangkut pelayanan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kebersihan kantor.

Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan serta Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian. (baca: **Lampiran 21 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial**)

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari Kepala Subbag. Umum dan Keuangan merangkap sebagai Plt. Sekretaris, Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masing-masing sebanyak 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang merangkap Panitera Pengganti, Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana 1

(satu) orang dan sebagai Bendahara Penerimaan / PNBP merangkap Panitera Pengganti 1 (satu) orang dan staf Umum dan Keuangan sebanyak 12 orang (2 dari PNS dan 1 PPPK dan 10 dari tenaga kontrak) termasuk petugas keamanan dan cleaning service, sedang Pegawai dari Kepegawaian dan Ortala terdiri dari 1 Analis SDM Aparatur dan 1 orang PPNPN sedangkan dari Perencanaan, IT dan Pelaporan sebanyak 2 orang pegawai terdiri dari 1 orang Pranata Komputer ahli Pertama dan 1 orang Penelaah Teknis Kebijakan dan 1 orang tenaga kontrak (baca: *Lampiran 22 tenaga non teknis* ).

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (Panitera dan Jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.





## BAB IV

# PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, penerapan kaidah-kaidah yang baik antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

pelaksana teknis serta secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Pejabat Penandatangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, serta dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dan beberapa operator. Semua Pejabat Pengelola Keuangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 memperoleh 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

**1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)**

Pengelolaan Keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan badan pada akun standart, namun yang digunakan dalam DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.604730/2023 tanggal 30 November 2022 ada 3 tiga jenis belanja yakni :

**a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang termasuk kelompok belanja pegawai adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

**- Pagu Anggaran**

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 7.683.722.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua

ribu rupiah)

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 7.576.279.367,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar 98.60% .

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran tersebut belanja pegawai sisa sebesar Rp. 107.442.633,- (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) Matrik terlampir pada (*Lampiran 23*).

**b. Belanja Barang**

Belanja barang yaitu berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada Pengadilan terdiri dari belanja barang Operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

- **Pagu Anggaran**

Pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk belanja barang non operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun 2023 mendapatkan pagu sebesar Rp 32.961.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan untuk belanja operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu sebesar Rp. 1.443.898.000,- ( satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- **Realisasi Anggaran**

Belanja Barang Operasional dengan Pagu sebesar Rp. 1.468.929.000,- ( satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada tahun anggaran 2023 telah terealisasi



sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 1.468.919.150,- ( satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) sebesar 100% Matrik terlampir pada (*Lampiran 24*).

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima untuk belanja barang non operasional ada sisa dana sebesar Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk belanja barang operasional berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi masih ada sisa dana sebesar Rp 9.850,- (sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa anggaran tersebut ada pada kebutuhan sehari –hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan konsultasi.

**c. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan maksimal kapitalisasi aset tetap atau aset yang ditetapkan pemerintah.

- **Pagu Anggaran**

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama memperoleh belanja modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa renovasi gedung kantor.

**Realisasi Anggaran**

Realisasi sebesar Rp. 199.500.100,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu seratus rupiah) untuk renovasi atap ruang sidang.

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan realisasi anggaran belanja modal berupa renovasi atap ruang sidang. ada sisa sebesar Rp 499.900,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau 99.75 %. Matrik terlampir pada (*Lampiran 25*).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2023 sebesar

Rp. 0,- (nol rupiah) untuk Dipa 01. Matrik terlampir pada (*Lampiran 26*).

## **2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama (Badilag)**

Dipa ini berasal Badan Peradilan Agama (Dipa 04) dengan Nomor : DIPA-005.04.2.604731/2023 tanggal 30 November 2022, membagi 3 jenis pelaksanaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Pagu Anggaran**

Pagu sebesar Rp. 165.800.000,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- 1). Percepatan Penyelesaian Perkara Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara;
- 2). Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM);
- 3). Pembebasan Biaya Perkara;
- 4). Sidang Diluar Gedung Pengadilan.

### **b. Realisasi Anggaran**

Dari pagu sebesar Rp. 165.800.000,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) telah terserap / terealisasi sebesar 164.834.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,42 % sehingga semua belanja barang terserap dengan baik.

### **c. Sisa Anggaran**

Berdasarkan realisasi belanja barang hanya terdapat sisa sebesar Rp 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) karena volume perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tinggi sehingga membutuhkan belanja barang yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan terutama untuk kegiatan sidang keliling yang belum bisa dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Matrik terlampir pada (*Lampiran 27*).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2023 sebesar

Rp. 824.278.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk Dipa 04. Matrik terlampir pada (*Lampiran 28*).

## **B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung**

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara



telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang .

- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 2 KIB, yakni KIB Bangunan gedung kantor lama yang sekarang telah di alih fungsikan sebagai Gedung Arsip, dan KIB Bangunan gedung kantor baru yang telah ditempati serta 2 KIB tanah negara.
- Melaksanakan revaluasi terhadap bangunan gedung dan tanah, dan telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

#### ***Gedung lama :***

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lama, terletak di Jl. Panji No.202 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang, dibangun di atas tanah seluas 4.000 (empat ribu) M<sup>2</sup>, di mana luas tanah untuk bangunan 845 (delapan ratus lima puluh lima) M<sup>2</sup> dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) M<sup>2</sup>. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ruangan termasuk didalamnya 3 (tiga) ruang sidang dan sekarang dialifungsikan pemanfaatannya menjadi Gedung Arsip sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi nomor: 209/BUA/SK/10/2017.

#### ***Gedung baru :***

Gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang baru, terletak di Jl. Raya Mojosari Kepanjen Kabupaten Malang, luas tanah seluas 6.423 (enam ribu empat ratus dua puluh tiga) M<sup>2</sup>, di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.800 (seribu delapan ratus) M<sup>2</sup> dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) M<sup>2</sup>. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut merupakan

gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ruangan termasuk didalamnya 1 (satu) ruang sidang utama dan 3 (tiga) ruang sidang biasa.

**a. Pengadaan**

Dalam Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan belanja Modal penambahan nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa renovasi atap ruang sidang. Pagu Belanja Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan terealisasi Rp. 199.500.100 (seratus sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu seratus rupiah) atau sebesar (99.75%).

**b. Pemeliharaan**

Dalam Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Pagu Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp. 359.245.000 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 359.236.042 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) atau sebesar (100%), Hal ini digunakan untuk pengecatan gedung dan perbaikan-perbaikan lainnya / termasuk kamar mandi.

**c. Penghapusan**

Dalam Tahun anggaran 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terdapat pengajuan penghapusan tanah, gedung dan bangunan.

**2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku

dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan Semester II Tahun 2023 ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2023, dan juga telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.
- Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak 46 (empat puluh enam) ruangan.
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit.
- Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.

Adapun barang jenis barang inventaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Matrik terlampir pada **Lampiran 29**.

Di samping pengelolaan inventaris berupa Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin juga terdapat pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi :

Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi :

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar.
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak perpustakaan serta di masukkan pada aplikasi



SLIMS (*Senayan Library Management Sytem*) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang

- Melayani para peminjam buku.

#### a. Pengadaan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana untuk Pengadaan Belanja penambahan nilai Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar 199.500.100 (seratus sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu seratus rupiah) (99.75%). sisa anggaran sebesar Rp. 499.900,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

#### b. Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pada Tahun anggaran 2023 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 212.695.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yaitu berupa :

- Kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp. 14.030.000,- (empat belas juta tiga puluh ribu rupiah)
- BBM Mobil Sewa sebesar Rp. 24.935.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Server sebesar Rp. 3.975.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Perawatan PC sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Perawatan Laptop/Notebook sebesar Rp. 5.161.000,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Perawatan Printer sebesar Rp. 4.564.000,- (empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Genset sebesar Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

- AC Split sebesar Rp. 13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pemeliharaan Inventaris Kantor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Kendaraan Bermotor Roda 4 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 212.588.984, (dua ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) (99,95)% sisa anggaran sebesar Rp. 106.016,- (seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)

#### **c. Penghapusan**

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mengajukan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung karena belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana yang berupa meubelair, ada beberapa meja dan kursi yang kurang layak namun masih tetap dipergunakan.

#### **d. Kegiatan Administrasi Umum pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengelolaan kegiatan Urusan Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi pengurusan surat menyurat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **1). Pengurusan surat-menyurat.**

- a) Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 3416 (tiga ribu empat ratus enam belas) pucuk surat terdiri dari
  - Surat dari Pengadilan Agama Se Indonesia.
  - Surat dari Mahkamah Agung RI.
  - Surat dari Badan Peradilan Agama.
  - Surat dari perorangan dan instansi lain.
 Surat-surat tersebut meliputi :

- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) pucuk surat
- HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) pucuk surat
- KP (Kepegawaian) sebanyak 68 (enam puluh delapan) pucuk surat
- KU (Keuangan) sebanyak 21 (dua puluh satu) pucuk surat
- KS (Keseekretariatan) sebanyak 4 (empat) pucuk surat
- PL (Perlengkapan) sebanyak 14 (empat belas) pucuk surat
- HK (Hukum) sebanyak 3025 (tiga ribu dua puluh lima) pucuk surat
- PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 54 (lima puluh empat) pucuk surat
- PB (Pembinaan) sebanyak 25 (dua puluh lima) pucuk surat
- PS (Pengawasan) sebanyak 5 (lima) pucuk surat.
- SK (Surat Keputusan) sebanyak 7 (tujuh) pucuk surat

**(Lampiran 31)**

- b) Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar sebanyak 8107 (delapan ribu seratus tujuh) nomor surat, yang terdiri dari :
- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 104 (seratus empat) pucuk surat
  - HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 86 (delapan puluh enam) pucuk surat
  - KP (Kepegawaian) sebanyak 1187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) pucuk surat
  - KU (Keuangan) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) pucuk surat
  - KS (Keseekretariatan) sebanyak 5 (lima) pucuk surat
  - PL (Perlengkapan) sebanyak 63 (enam puluh tiga) pucuk surat
  - HK (Hukum) sebanyak 6324 (enam ribu tiga ratus dua puluh empat) pucuk surat

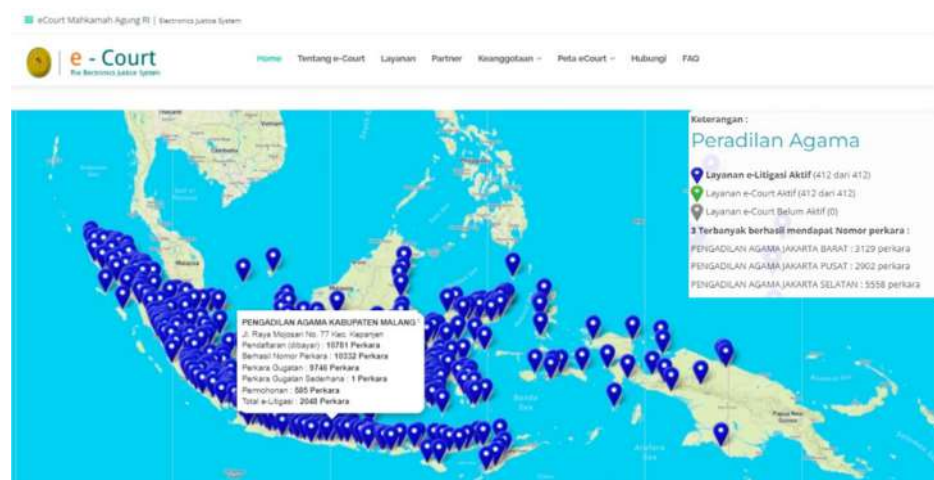


- PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 11 (sebelas) pucuk surat
  - PB (Pembinaan) sebanyak 0 (nol) pucuk surat
  - PS ( Pengawasan) sebanyak 12 (dua belas) pucuk surat.
- (Lampiran 32)

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### ■ IMPLEMENTASI *E-COURT* DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Dasar hukum layanan *e-Court* adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019** tentang **Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan *e-Court* sejak Desember 2018 hingga sekarang. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil mendapat nomor perkara melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 1966 (seribu Sembilan ratus enam puluh enam) perkara, Screenshot diambil pada tanggal 09-01-2024 pukul 08.57 WIB).



Pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung *e-Court* berupa sosialisasi informasi

*e-Court* kepada masyarakat sebagai Pengguna terdaftar lainnya seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang kemudahan layanan *e-Court*.

Diperlukan adanya sosialisasi informasi *e-Court* karena dengan menggunakan *e-Court* banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya *e-Court* lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas Pengadilan menjadi terjaga.

Meriviu kembali tentang definisi *Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*, *Administrasi Perkara secara Elektronik* adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan Peradilan. Sedangkan persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain (Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2019). Pengguna Terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana Advokat disumpah, sedangkan persyaratan untuk Pengguna Lain adalah :

- a. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
- c. Penetapan ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Faktanya, walaupun layanan administrasi perkara telah merata untuk semua kalangan, namun yang terbanyak dari pengajuan tersebut adalah Pengguna Terdaftar, sedangkan Pengguna Lain masih bisa dihitung dengan jari. Hal inilah yang mendasari Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat inovasi tentang tata cara pendaftaran Pengguna Lain tanpa harus pergi ke kantor Pengadilan yakni secara online dan bisa diakses dari mana saja dengan link yang telah disediakan ( [www.pa-malangkab.go.id/ecourt](http://www.pa-malangkab.go.id/ecourt) ).

Hal ini tentu menjadi bukti keseriusan lembaga Peradilan dalam membangun era baru berbasis teknologi untuk melayani sebagai motto MA dalam Ulang Tahunnya yang ke 78 dengan tema **"Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan Yang Agung"**.

#### ▪ **IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilaksanakan hingga saat ini. SIPP yang merupakan aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat yang dikembangkan secara terus-menerus oleh Mahkamah Agung RI untuk digunakan oleh lembaga Peradilan baik tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi secara nasional. Sistem ini dapat menjamin kevalidan struktur aplikasi

dan data mengingat sinkronisasi database dilakukan secara *realtime* melalui internet. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim serta sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah

Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi terbaru 5.3.1 yang merujuk pada Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini dapat memperingan beban tugas kita.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak henti-hentinya meningkatkan dan mempertahankan kinerja SIPP hingga pada bulan Januari 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan atas Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Kinerja SIPP Jumlah Lebih dari 5000 Perkara di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 berdasarkan nomor sertifikat W13-A/480/KP.05.8/01/2023. Dan pada bulan Oktober 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan atas Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kinerja SIPP Jumlah di atas 5000 Perkara di Lingkungan PTA Surabaya Semester I Tahun 2023 berdasarkan nomor sertifikat 4781.1/KPTA.W13-A/KP5.8/X/2023. Hal tersebut merupakan usaha dan upaya seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerja SIPP selama tahun 2023.





## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. ZONA INTEGRITAS**

Salah satu dari 5 prioritas kerja Presiden adalah Reformasi Birokrasi, Presiden RI Joko Widodo meminta agar birokrasi di tanah air berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat. Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan ZI di PA. Kab. Malang diawali dengan dengan penancangan tahun 2018 dan terus dilakukan upaya internalisasi nilai-nilai pembangunan zona integritas dengan merubah perilaku individu dari aparatur yang minta dilayani bertransformasi menjadi perilaku melayani akan melahirkan budaya kerja yang positif. Hal ini dimulai dari sikap keteladanan pimpinan yang menjadi uswatun hasanah.

Aparatur yg profesional dan berintegritas akan menghasilkan pelayanan prima dan kinerja yg maksimal bagi satuan kerja. Untuk itu PA Kab.Malang selalu berusaha memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pelatihan, juga mengadakan DDtK dan in house training agar terwujud aparatur peradilan yg berjiwa hospitality dengan selalu menerapkan 5S.

Dengan SDM yang profesional dan handal kami siap mewujudkan Zona Integritas dengan tekad membangun SDM yang bisa diandalkan untuk mengubah budaya kerja menuju lingkungan kerja yang bermartabat, konsisten dalam kedisiplinan maupun belajar serta memperbarui pola pikir dan perilaku yang semakin baik. Dengan menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pelayanan prima terwujud dari seluruh aparatur pengadilan di mulai dari security hingga seluruh staff pelayanan. Atas prestasi itu PA. Kab. Malang meraih predikat Pelayanan Prima dari

kemenPANRB.

Pada tahun 2023 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan anugerah sebagai satuan kerja yang meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja tanggal 4 Desember 2023. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mendapatkan nilai total sejumlah 92,09 dan mendapatkan nilai tertinggi nomor 2 dari 60 Satuan Kerja. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan setelah sebelumnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang melewati berbagai tahapan dimulai dari seleksi administrasi, Desk Evaluation (analisis dokumen dan wawancara), validasi dan pengolahan survey, evaluasi lapangan hingga panel final dan clearance.



**B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)****PENGERTIAN:**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi Peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

**TUJUAN**

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan.
- c. Menjaga independensi dan imparial aparatur Pengadilan.

**PRINSIP**

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Integrasi;
- b. Koordinasi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;
- e. Aksesibilitas;
- f. Transparansi; dan
- g. Akuntabilitas;

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar



Pelayanan Peradilan, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada era modernisasi saat ini, lembaga Peradilan perlu mendapat dukungan teknologi informasi yang mumpuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga didapatkan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk menunjang prasyarat tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang trampil, baik dalam pengoperasian alat (*tools*) perangkat lunak-software maupun perangkat keras-hardware setelah kebutuhan prasarana tercukupi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyiapkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi pelayanan publik yang menunjang pelayanan publik secara umum, dan para pihak yang berperkara secara khusus serta mampu mempercepat pekerjaan dari aparaturnya Pengadilan, terutama pada masa transisi dari pandemi Covid-19. Dalam menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbenah diri dengan terus melakukan inovasi dan tidak berhenti namun tetap berkarya dan memberikan sumbangsih kepada dunia Peradilan, dimana dalam kurun waktu tersebut telah memiliki beberapa aplikasi andalan yang dipergunakan untuk area pelayanan publik yakni :

1. **Aplikasi Maskarebet** (Mengantri Sidang Tanpa Ribet), sebuah aplikasi yang berbasis web server dan tersedia pada website resmi, dengan mengambil dari database SIPP versi terbaru untuk memberikan informasi mengenai Jadwal Sidang kepada para pihak berperkara sekaligus dengan estimasi waktu pukul berapa akan disidangkan. Dengan aplikasi ini, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi mengantri dan berjubel untuk mendapatkan nomor antrian karena

penentuan antrian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang menyidangkan untuk kemudian ditayangkan dalam website resmi Pengadilan selang 3 hari sebelum sidang. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat informasi kepada para pihak berperkara dan akan hadir mengikuti persidangannya pada jam yang telah ditentukan.

2. ***Aplikasi Info Perkara SMS gateway***, yang dimaksud di sini adalah informasi mengenai keseluruhan perkara dari yang bersangkutan melalui sms, dengan mengetik perintah tertentu maka didapat hasil yang diinginkan. Aplikasi ini juga sinkron dengan Maskarebet dalam hal penyampaian informasi sidang kepada para pihak yang berperkara sehingga mampu mempermudah para pihak berperkara untuk menentukan kapan akan datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bersidang untuk perkaranya.
3. ***Aplikasi SIAGA (System Informasi Auto Replay)***, merupakan inovasi aplikasi untuk mengirimkan informasi jadwal sidang, akta cerai dan keuangan perkara melalui pesan whatsapp kepada para pihak berperkara ke nomor whatsapp yang terdaftar pada saat pendaftaran.
4. ***Aplikasi Mesin Antrian PTSP***, yang menggunakan kiosK juga dengan layar Sentuh (*Touchscreen*), di dalamnya terdapat menu untuk *mengentry* nomor perkara, atau pilihan penggunaan layanan yang akan dituju, sehingga dengan demikian bisa tercetak nomor antrian layanan sesuai antriannya. Aplikasi ini membuat pelayanan menjadi lebih tertib dan antrian tidak menumpuk sehingga memudahkan proses berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
5. ***Aplikasi Media Informasi Antrian Persidangan dan PTSP***, aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu media mengenai kapan akan dipanggil sesuai antriannya, berapa nomor antrian yang telah dipanggil dan dengan menggunakan layar datar TV secara khusus mampu menjembatani sisi hiburan dalam batas waktu tunggu bagi para pihak berperkara dengan menyediakan informasi televisi nasional.
6. ***Telescop***, singkatan dari Telusuri Surat Cerai Ori atau Palsu, yakni aplikasi berbasis web yang tersedia di website resmi Pengadilan

Agama Kabupaten Malang untuk mengecek apakah Akta Cerai telah terbit atau belum, berikut memberikan informasi mengenai keabsahan dan keaslian Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini tentu sangat berguna bagi para pihak berperkara dan juga pihak terkait seperti pihak KUA (Kantor Urusan Agama) ataupun bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai dan akan menikah lagi.

7. **AREMA PLUS card**, merupakan terobosan baru bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pihak berperkara, agar lebih tertib dan mudah dalam mengakses ruang pelayanan sekaligus merupakan pintu lapis keamanan pertama PA Kab. Malang bagi para pihak berperkara yang akan memasuki ruang tunggu. Inovasi bernama **AREMA PLUS card**, dengan pintu masuk secara elektrik (*gate system*) mempunyai cara kerja sederhana dengan terlebih dahulu melakukan registrasi **AREMA PLUS card** untuk kemudian diberikan kepada para pihak berperkara pada saat pendaftaran perkara. Setelah proses registrasi kartu oleh petugas PTSP, maka para pihak dapat memasuki ruang tunggu melalui pintu elektrik dengan mendekatkan/tap **AREMA PLUS card** pada *gate system*, dan karena Server telah mengenali dan merespon kartu tersebut secara realtime, maka palang pintu akan terbuka secara otomatis dan bila kartu tidak terdaftar, maka palang pintu elektrik tidak akan terbuka. **AREMA PLUS card** juga mempunyai keunggulan lain seperti dapat melakukan tapping (tempel) pada mesin antrian sehingga secara otomatis akan tercetak nomor antrian dan disisi lain, **AREMA PLUS card** juga dapat digunakan untuk memantau informasi perkara serta layanan lainnya menggunakan aplikasi **AREMA PLUS mobile** yang login akunnya hanya dengan memindai qrcode pada **AREMA PLUS card** tersebut sehingga sangat mudah untuk digunakan para pihak berperkara mengingat **AREMA PLUS card** telah tersambung dengan database perkara SIPP.

8. ***AREMA PLUS Mobile***, merupakan inovasi aplikasi layanan dengan berbasis aplikasi android. Aplikasi ini memiliki fitur yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Pengadilan Agama Kab. Malang seperti jadwal sidang, keuangan perkara, live chat dll. Aplikasi ini memudahkan pihak berperkara dalam mengakses informasi persidangan melalui smartphone.
9. ***Buku Tamu Elektronik***, merupakan sebuah aplikasi Buku Tamu Digital untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan **tamu** maupun pengunjung yang datang, dengan cara memindai wajah tamu ataupun pengunjung pada kamera yang terpasang di meja resepsionis Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Setelah data tersimpan, tamu atau pengunjung mendapatkan **kartu tamu unik** bersistem RFID sehingga tidak akan tertukar dengan tamu atau pengunjung lain.
10. ***Drive-Thru***, merupakan inovasi layanan Pengambilan Produk Pengadilan secara Drive-Thru yang dikembangkan oleh Tim IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai sarana pengambilan produk pengadilan (Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan), Para pihak dapat menentukan tanggal dan jam pengambilan produk (Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan) Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui website dan datang pada waktu yang telah dipilih tanpa harus mengantri terlebih dahulu.
11. ***Pojok Konseling***, Pojok Konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan inovasi yang dilatar belakangi oleh kepedulian Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kesehatan mental masyarakat pencari keadilan khususnya bagi penyandang disabilitas dan pemohon Dispensasi Kawin (DK). Hasil dari kegiatan konseling ini berupa catatan konseling yang kemudian akan menjadi dasar psikolog untuk memberikan surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut kemudian akan dimasukkan pada berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Hal ini



tercantum dalam pasal 15 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog.

12. ***Pengoptimalan Fasilitas Ruang Laktasi***, Pelayanan terhadap Ibu hamil dan Ibu menyusui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerlukan perlakuan khusus yang harus disediakan terutama Ruang laktasi yang mana sangat dibutuhkan oleh Ibu hamil dan Ibu menyusui yang termasuk dalam kelompok rentan.

- Pemberian Wallpaper di sebagian dinding Ruang Laktasi
- Penggantian cover meja agar lebih menarik
- Penataan ruang laktasi terbaru
- Pemberian mainan anak-anak yang edukatif
- Pemberian poster edukatif bagi ibu menyusui
- Pemberian lemari pendingin untuk penyimpanan ASIP

13. ***Pojok Informasi Bagi Perempuan***, Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian. Untuk mendukung program Pengadilan Agama Kabupaten Malang ingin mengoptimalkan dengan cara membuat Pojok Informasi bagi Perempuan yang berisikan informasi mengenai Hak-hak perempuan dan anak diantaranya :

1. Formulir pengajuan gugat cerai yang mencantumkan permintaan nafkah
2. Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
3. Hak-hak perempuan pada Pengadilan Agama
4. Hak-hak perempuan dan anak setelah terjadi perceraian
5. Cara memperoleh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
6. Brosur pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

Pihak yang diharapkan mendukung Hak-hak Perempuan dan Anak

- Perempuan sebagai pemilik hak
- Laki-laki sebagai kepala keluarga
- Hakim dengan memberikan putusan yang adil
- Advokat dengan memberikan bantuan hukum
- Pegawai pengadilan yang bisa memberikan informasi dan pelayanan

Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga mengembangkan inovasi khusus bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan bukti komitmen Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Pengadilan Inklusif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Inovasi tersebut diantaranya adalah:

1. **Layanan Khusus Disabilitas**, merupakan sebuah inovasi yang berupa fasilitas bagi pengandang disabilitas untuk mempermudah akses terutama di PA Kab Malang sehingga penyandang disabilitas dapat diperlakukan sama seperti lainnya. Fasilitas tersebut berupa halte disabilitas, jalur khusus disabilitas, toilet disabilitas, loket disabilitas, buku braile dan beberapa alat bantu seperti tongkat, kursi roda, dan alat bantu dengar.
2. **Aplikasi Sistem Audio To Text Recording ( ATR )** adalah aplikasi untuk merubah suara menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi *google speech API (Application Programming Interface)* dengan fitur *translation*-nya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks dan audio. Aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan SIPP 5.3.1. ATR yang ada di PA Kab. Malang terus mengalami pengembangan dan terakhir AVTR v.1 (Audio Video Teks *recording*) dimana kesemuanya akan secara otomatis terekam dalam bentuk video, audio dan teks secara simultan dan realtime dengan format \*.webm yang mempunyai ukuran file lebih kecil dan tidak menghabiskan media

penyimpanan. Aplikasi tersebut sangat berguna untuk penyandang disabilitas rungu mempermudah penyandang disabilitas rungu dalam mengikuti persidangan, karena percakapan selama persidangan terkonversi secara otomatis menjadi teks dan dapat terbaca pada layar komputer yang ada didepan para pihak, juga TV media yang ada di ruang sidang

3. ***Automatic Door Sensor Disabilitas (ADSD)***, merupakan sebuah inovasi yang berupa Kartu Prioritas Arema Gold yang diberikan kepada penyandang disabilitas sehingga dapat mengakses ke semua ruang pelayanan secara mandiri, dengan alat sensor dan terkoneksi dengan kartu yg dibawanya maka penyandang disabilitas khususnya tuna netra akan mengetahui keberadaannya di ruang pelayanan/ruang sidang.
4. ***Deteksi Dini***, sebagai upaya peningkatan layanan inklusif bagi para penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki Deteksi Dini Penyandang Disabilitas. Deteksi dini dilakukan dengan pengisian formulir penilaian personal penyandang disabilitas yang diisi pada saat pendaftaran. Sehingga dengan adanya deteksi dini ini, penyandang disabilitas dapat dipetakan dan diidentifikasi termasuk kategori penyandang disabilitas apa serta fasilitas apa saja yang dibutuhkan berdasarkan jenis disabilitas tersebut.
5. ***Brosur Informasi Berperkara Braille & Papan Penunjuk Arah Braille***, brosur informasi berperkara dalam huruf braille ini disediakan dalam rangka mempermudah akses layanan informasi berperkara khususnya persyaratan pengajuan perkara bagi penyandang disabilitas tuna netra di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Papan penanda arah dan papan penanda ruangan braille juga memudahkan pengunjung Pengadilan Agama Kabupaten Malang penyandang disabilitas tuna netra untuk mengetahui arah dan ruangan mana yang harus dituju.
6. ***Optimalisasi Antrian Pelayanan Perkara***, memberikan tanda kepada para pencari keadilan pada kelompok rentan untuk memudahkan

petugas memberikan pelayanan prioritas secara tepat sasaran.

7. ***Brosur Audio Terintegrasi QRCODE bagi Kelompok Tuna Netra,***  
Brosur audio terintegrasi QRCODE ini merupakan brosur yang dibuat untuk mempermudah para pihak dari kelompok Tuna Netra untuk mengakses persyaratan pendaftaran perkara yang hendak didaftarkan.
8. ***Digitalisasi Peminjaman Fasilitas Alat Bantu Disabilitas,***  
memberikan kemudahan melalui digitalisasi kepada para pencari keadilan pada kelompok rentan dalam meminjam alat yang dibutuhkan.





## BAB VI

# PENGAWASAN

### A. PENGAWASAN INTERNAL

Mahkamah Agung selaku pengendali kebijakan bagi segenap aparatur Pengadilan di seluruh Lembaga Peradilan dibawahnya selalu menekankan kedisiplinan dan meningkatkan pengawasan intern secara ketat dan transparan. Keseriusan Mahkamah Agung dalam membenahan internal tersebut tergambar dari terbitnya regulasi 3 Perma yang sejalan dengan cetak biru Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung kurun waktu 5 tahunan kedua, yakni tahun 2020-2024, yakni Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu instrument manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

## 1. PENGAWASAN MELEKAT

Yang dimaksud Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara terus-menerus mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap triwulan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : Nomor : 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/SK/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan surat tersebut telah dilaksanakan pengawasan bidang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2023 dan ditemukan beberapa temuan yang telah ditindaklanjuti dan dilaporkan pada Laporan Tindak Lanjut Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023. Bahkan laporan temuan dan tindak lanjut tersebut dipampang dalam website resmi Pengadilan guna mendapatkan perhatian

dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

## 2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah *pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

Pengawasan fungsional dalam Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016). Terkait hal ini, maka pengawasan fungsional Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku atasan langsung dan Badan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** (disingkat APIP) di Lembaga Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.

## 3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan



pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat / bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI. yang masuk dalam Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Bawas MARI.)

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com) serta melalui nomor ponsel pengaduan yang cepat dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai. Selain itu dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara langsung, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menempatkan petugasnya dalam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) guna penyelesaian yang cepat dan mudah.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint yang terkoneksi secara online melalui aplikasi dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan url : [absensi.pta-surabaya.go.id](http://absensi.pta-surabaya.go.id) maupun secara manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi online tersebut dan manual secara langsung dengan mencocokkan pada hasil print out fingerprint setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 serta Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

## B. EVALUASI PENGAWASAN

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat dinas secara berkala kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna melakukan evaluasi kerja atas tugas dan tanggungjawab masing-masing mengingat salah satu kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik Hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Bahkan, hasil dari Rapat dinas secara berkala tersebut dapat diakses oleh publik di Laman resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai wujud keterbukaan informasi.
2. Mengadakan assessment internal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya administrasi baik dibidang manajemen, kepaniteraan maupun kesekretariatan terkait dengan mutu pelayanan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh jajaran terkait atas hasil rapat pembinaan, rapat kerja nasional maupun rapat kerja daerah baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  - b. Setelah melakukan pemeriksaan, masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksian dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan

yang ditemukan.

- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilakukan evaluasi.
  - d. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melakukan monev atas hasil temuan Hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris serta jajarannya agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam skala prioritas.
  - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi akan dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
  - f. Surat Keputusan, struktur, temuan dan tindaklanjut tersebut dapat pula diakses oleh publik di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga mampu menciptakan iklim budaya kerja cepat, efisien dan efektif serta mampu beradaptasi pada perubahan.
5. Mengadakan rapat koordinasi berupa *Coffee Morning* yang dilaksanakan setiap minggu yang diikuti oleh seluruh jajaran hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan PPNPN. Kegiatan *Coffee Morning* ini dilaksanakan untuk menjadi forum diskusi antara pimpinan dan aparatur PA Kab. Malang untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.





## BAB VII

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2023 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara tahun 2022 sebanyak sejumlah 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 8.181 (delapan ribu seratus delapan puluh satu) perkara dengan total total perkara yang ditangani sejumlah 9.042 (Sembilan ribu empat puluh dua) perkara dan telah berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan sebanyak 8.648 (delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) perkara (95,64%) (sembilan puluh lima koma enam puluh empat persen), sisanya sebanyak (4,36%) (empat koma tiga puluh enam persen). Dengan demikian pada tahun 2023 rasio tunggakan (sisa perkara) 4,36% (empat koma tiga puluh enam persen) atau lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen).

Pada tahun 2023, perkara yang diterima mengalami **penurunan** sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara atau 15% (lima belas persen) apabila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2022 yang diterima sebanyak 9.569 (sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan) perkara. Presentase penyelesaian perkara (minutasi) tersebut telah sama dengan data monitoring SIPP versi 5.3.1 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan *Realtime* rasio penanganan perkara SIPP sebesar 95,64%. Adapun sisa perkara yang masih 4,36% tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media massa dan pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil terlebih dahulu secara resmi dan patut.

2. Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara dan telah diputus pada tahun 2023 sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara (75%). Selanjutnya perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 sebanyak 16 (enam belas) perkara. Kemudian terdapat 5 perkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2023.

3. Target Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 telah terpenuhi dengan baik, dari target 100%, terealisasi sebesar 98,95% dan sisa 1,05% dengan perincian untuk Belanja Pegawai terealisasi sebesar 98.60%, Belanja Barang baik operasional maupun non operasional terealisasi sebesar 100% dan Belanja Modal terealisasi sebesar 99,75%, sedangkan DIPA 04 mampu terserap 99,42% sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana DIPA 04 di 3 (tiga) Area pelayanan publik yakni Sidang keliling, Pos Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo (biaya gratis).
4. Program prioritas pembaruan sebagaimana 8 area perubahan yang dicanangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai implementasi dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yakni 1. Manajemen Perubahan, 2. Deregulasi Kebijakan, 3. Penataan dan penguatan organisasi, 4. Penataan tatalaksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terus menerus dilakukan sesuai dengan SOP dengan sistem yang terencana dan komprehensif dan pula telah dikongkritkan sebagiannya dengan program-program prioritas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 meliputi: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu (*one day publish*) ; 2). Manajemen SDM; 3). Pengawasan/Pengaduan; 4). Pengelolaan website; 5). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan 6). Implementasi Program Legislasi Nasional yakni “*Justice for all*” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum).
5. Pelaksanaan administrasi perkara menggunakan SIPP versi terbaru 5.3.1 untuk

sistem Online untuk sistem penyimpanan data digital secara internal dan Upload Sinkronisasi Direktori Putusan secara online/eksternal;

6. Penatausahaan tugas di bidang Kesekretariatan telah memakai tools atau aplikasi yang secara umum dapat dibagi sebagai berikut :
  - a. Sekretariat : KOMDANAS dan SIMARI;
  - b. Bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP, SIKEP ABS dan E-KINERJA;
  - c. Bagian Umum dan Keuangan memakai sistem aplikasi GPP sedangkan berbasis web : SIMFONY PNBPN, SIMAN dan OMSPAN, SAKTI, E-SADEWA;
  - d. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan memakai sistem aplikasi SATUDJA online, SAKTI, E-MONEV, LPSE, SIRUP, KINSATKER, E-IPLANS, E-BIMA dan SIMTALAK.

Yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan aturan yang ditetapkan.

7. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

## **B. REKOMENDASI**

1. Perlu adanya penambahan jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita karena sudah tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim dan seluruh pegawai perlu ditingkatkan guna mewujudkan Hakim dan pegawai yang professional, berwawasan luas, terampil dan bertanggungjawab.
3. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon untuk meninjau Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena masih membutuhkan anggaran belanja modal untuk perluasan gedung kantor terutama untuk ruang Aula, ruang Hakim, ruang Panitera Pengganti, ruang Panitera Muda dan ruang Kepala Sub Bagian.

4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon dapat mengupayakan peningkatan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan meubelair, AC, laptop, PC dan printer untuk mendukung percepatan administrasi peradilan yang optimal.
5. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon dapat mengupayakan anggaran perawatan Gedung Arsip karena selama ini belum tercover di DIPA Pengadlan Agama Kabupaten Malang dan sudah kita usulkan di ABT melalui aplikasi E-iplans tetapi masih belum juga terealisasi untuk perawatan Gedung tersebut.

### C. PENUTUP

Secara runtut dan sistematis, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah bentuk realisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 1 tahun berjalan dan hal ini adalah hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari jajaran Pimpinan, para Hakim, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya maksimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga didapat pula hasil maksimal dengan meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan tugas pokok telah menunjukkan arah perbaikan dari tahun sebelumnya sehingga menumbuhkan harapan baru akan tercapainya target realisasi tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan pada tahun depan dengan lebih sempurna, sistematis dan tertib administrasi.

Dengan sistematika laporan (*outline*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI, menjadikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tampil lebih sederhana dan lebih mudah dalam pembuatannya namun lengkap dan terperinci serta terarah pada program dan kegiatan serta capaian kinerja sehingga hal ini jelas sangat



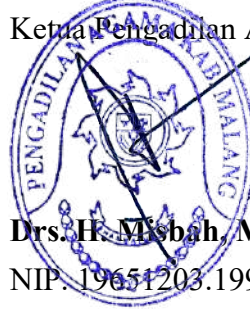
membantu dalam pembuatan Laporan mengingat laporan inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Kami pun sadar tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak terkait sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sempurnanya laporan dimaksud.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian tetap memperoleh Rahmat, Taufiq, dan Hidayah dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Kepanjen, 31 Desember 2023

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



**Drs. H. Misbah, M.H.I.**

NIP. 19651203.199003.1.001



**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

Nomor	Jenis Perkara  Pengadilan Agama	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syaria'h	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infad/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan
		Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari	3	0	0	0	0	239	582	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	16	0	107	5	0	0	0	0	0	0	6	2	975	
2	Februari	2	0	0	1	0	157	379	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	49	0	66	3	0	3	0	0	0	0	2	1	675	
3	Maret	1	0	0	0	0	161	399	3	2	0	0	0	0	13	0	0	0	6	0	5	0	71	4	0	0	0	0	0	0	7	0	672	
4	April	0	0	0	0	0	30	83	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	44	2	0	1	0	0	0	0	5	2	178	
5	Mei	1	0	0	0	0	229	660	1	2	0	0	0	0	15	0	0	0	8	0	50	0	100	1	1	1	0	0	0	0	3	1	1073	
6	Juni	0	0	0	0	0	166	437	1	1	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	15	0	115	4	1	4	0	0	0	0	7	0	769	
7	Juli	1	0	0	1	0	182	450	1	1	0	0	0	0	7	0	0	0	4	0	12	0	49	0	1	3	0	0	0	0	7	0	719	
8	Agustus	1	0	0	1	0	166	512	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	11	0	66	2	0	1	0	0	0	0	10	2	783	
9	September	0	0	0	0	0	135	390	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	11	0	122	3	1	3	0	0	0	0	9	3	694	
10	Oktober	1	0	0	1	0	162	435	4	3	0	0	0	0	8	0	0	0	7	0	12	0	145	4	0	3	0	0	0	0	12	1	798	
11	November	0	0	0	3	0	157	368	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	6	0	10	0	84	0	2	0	0	0	0	0	5	2	647	
12	Desember	0	0	0	0	0	34	107	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	0	40	1	0	1	0	0	0	0	2	0	198	
<b>JUMLAH</b>		10	0	0	7	0	1818	4802	18	13	0	0	0	0	95	0	0	0	63	0	202	0	1009	29	6	20	0	0	0	0	75	14	8181	



Mengesahkan :  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Misbah, M.H.I  
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

Drs. H. Badawi Asyari, S.H., M.H.  
NIP. 19650209.199303.1.002

**LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

Nomor	Jenis Perkara  Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																												Wali Adlol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infra/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Perdamiaan	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46						
1	Januari	861	975	1836	63	0	0	0	0	0	200	478	1	2	0	0	0	0	8	0	0	0	2	0	10	0	100	6	0	0	0	0	0	6	1	10	6	3	0	0	896	940	896								
2	Februari	940	675	1615	61	2	0	0	0	0	167	395	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	14	0	73	3	0	0	0	0	0	4	1	10	14	2	0	0	761	854	761								
3	Maret	854	672	1526	47	2	0	0	1	0	148	408	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	45	0	60	4	0	0	0	0	0	0	1	5	8	6	0	0	747	779	747								
4	April	779	178	957	22	0	0	0	0	0	88	177	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	0	1	0	56	2	0	0	0	0	0	3	0	9	5	7	0	0	381	576	381								
5	Mei	576	1073	1649	60	0	0	0	0	0	117	386	0	3	0	0	0	0	11	0	0	0	4	0	4	0	80	1	0	0	0	0	0	4	1	6	11	8	0	0	696	953	696								
6	Juni	953	769	1722	74	0	0	0	0	0	170	448	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	9	0	41	0	122	1	0	0	0	0	0	3	1	6	4	8	1	0	899	823	899								
7	Juli	823	719	1542	64	0	0	0	0	0	133	384	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	4	0	10	0	50	3	0	0	0	0	0	5	0	13	12	4	0	0	691	851	691								
8	Agustus	851	783	1634	65	1	0	0	2	0	152	357	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	8	0	64	1	0	0	0	0	0	5	0	4	7	3	0	0	680	954	680								
9	September	954	694	1648	42	1	0	0	0	0	135	382	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	8	0	95	1	0	0	0	0	0	4	0	7	12	7	0	1	701	947	701								
10	Oktober	947	798	1745	75	0	0	0	0	0	119	389	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	8	0	9	0	114	5	1	0	0	0	0	10	1	51	41	10	0	0	840	905	840								
11	November	905	647	1552	82	0	0	0	0	0	147	355	1	2	0	0	0	0	9	0	0	0	6	0	4	0	77	1	0	0	0	0	0	1	1	24	34	7	0	0	751	801	751								
12	Desember	801	198	999	41	0	0	0	0	0	102	340	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	8	0	45	1	2	0	0	0	0	4	1	23	25	3	0	0	605	394	605								
	JUMLAH	861	8181	9042	696	6	0	0	3	0	1678	4499	8	9	0	0	0	0	87	0	0	0	58	0	162	0	936	29	3	0	0	0	0	49	8	168	179	68	1	1	8648	394	8648								

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Misbah, M.H.  
NIP. 19711002.199603.1.001



Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.  
NIP. 19650209.199303.1.002



**SISA PERKARA MENURUT JENISNYA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

Nomor	Jenis Perkara  SATKER	Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syaria'h	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infiaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Jumlah	Keterangan
					Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdhp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	'Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensal kawin	Wali Adlol										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG	861	8181	9042	0	0	0	1	0	114	269	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	394	
JUMLAH		861	8181	9042	0	0	0	1	0	114	269	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	394		

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

**Drs. H. Misbah, M.H.**  
NIP. 197120021990031.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

**Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.**  
NIP. 19650209.199303.1.002

**PERKARA PUTUS YANG BELUM DIMINUTASI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

Nomor	Jenis Perkara  SATKER	A. Perkawinan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-------	-----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Misbah, M.H.I  
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.  
NIP. 19650209.199303.1.002

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalakan	Tidak dapat diterima	
1	6142/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	19/12/2022	02/01/2023	27/02/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan.
2	6359/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	11/01/2023	20/01/2023	01/03/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
3	6720/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	16/01/2023	24/01/2023	07/03/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
4	1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	27/03/2023	05/04/2023	24/05/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
5	796/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	30/03/2023	11/04/2023	30/05/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
6	7432/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	13/04/2023	17/04/2023	07/06/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
7	1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	07/06/2023	21/06/2023	31/07/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
8	7032/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	03/07/2023	20/07/2023	11/08/2023				Permohonan Banding Telah Dicabut Pada Jumat, 11 Agu. 2023
9	1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	10/08/2023	22/08/2023	18/10/2023		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
10	4109/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	13/09/2023	19/09/2023	20/09/2023				Permohonan Banding Telah Dicabut Pada Rabu, 20 Sep. 2023

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat diterima	
11	4393/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	19/09/2023	22/09/2023	09/11/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
12	2936/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	10/08/2023	26/09/2023	13/11/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
13	3024/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	21/09/2023	02/10/2023	20/11/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
14	3940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	20/09/2023	10/10/2023	11/10/2023				Permohonan Banding Telah Dicabut Pada Rabu, 11 Okt. 2023
15	4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	23/10/2023	06/11/2023	19/12/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
16	5729/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	31/10/2023	06/11/2023	07/12/2023	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
17	5093/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	31/10/2023	14/11/2023	21/12/2023				Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
18	5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	15/11/2023	14/11/2023					Perkara belum diputus PTA Surabaya
19	5251/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	08/11/2023	29/11/2023	01/12/2023				Permohonan Banding Telah Dicabut Pada Jumat, 01 Des. 2023
20	3614/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	12/12/2023	12/12/2023					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
21	5103/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	24/10/2023	22/12/2023					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Misbah, M.H.I  
NIP. 19711002.199603.1.001

Kendal, 29 Desember 2023  
Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhaqi, S.H., M.H.  
NIP. 19650209.199303.1.002



**PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

No	Nomor Perkara	Tanggal			Putusan Tk. Kasasi	Amar Putusan Kasasi			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Putusan Tk. Banding	Daftar Kasasi		Dikabulkan	Ditolak Tk. Kasasi	Tidak dapat diterima Tk. Kasasi	
1	5360/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	23.11.2022	16.01.2023	30.01.2023	09.06.2023		✓		permohonan kasasi ditolak
2	4315/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	09.11.2022	19.01.2023	13.02.2023	25.07.2023	✓			permohonan kasasi dikabulkan
3	5937/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	14.12.2022	18.02.2023	21.02.2023	14.08.2023		✓		permohonan kasasi ditolak
4	2508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	15.12.2022	22.02.2023	06.03.2023	25.07.2023		✓		permohonan kasasi ditolak
5	2445/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	30.11.2022	02.02.2023	13.03.2023	02.08.2023		✓		permohonan kasasi ditolak
6	6164/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	20.12.2022	23.02.2023	13.03.2023	02.08.2023		✓		permohonan kasasi ditolak
7	7432/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	13.04.2023	07.06.2023	14.07.2023	17.10.2023		✓		permohonan kasasi ditolak
8	3024/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	21.09.2023	20.11.2023	28.11.2023					berkas belum dikirim ke MA RI

Mengesahkan:  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Muisbah, M.H.I  
NIP. 197109021990031.002

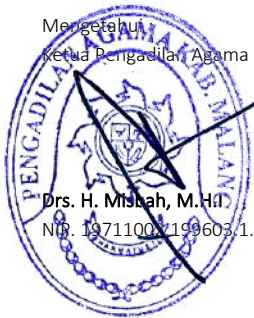
Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhar, S.H., M.H.  
NIP. 19650209199303.1.002

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

No	Nomor Perkara	Tanggal					Amar Putusan Kasasi			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Putusan Tk. Banding	Putusan Tk. Kasasi	Daftar PK	Putus PK	Dikabulkan	Ditolak Tk. Kasasi	Tidak dapat diterima Tk. Kasasi	
1	2605/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	12/10/2022	-	-	04/01/2023	31/05/2023		✓		Permohonan PK di Tolak
2	6240/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	08/02/2022	07/04/2022	28/11/2022	04/04/2023	02/08/2023		✓		Permohonan PK di Tolak
3	3116/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	27/06/2023	-	-	11/08/2023	01/09/2023				permohonan PK di Cabut
4	5360/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	15/11/2022	10/01/2023	10/06/2023	20/09/2023					Berkas telah di kirim ke MA RI
5	2458/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	28/09/2021	-	-	29/11/2023					Berkas belum dikirim ke MA RI

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. Misbah, M.H.  
NIP. 19711007199603.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.  
NIP. 19650209.199303.1.002

**LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

No	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Diterima Tahun ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih dalam proses	Sisa Perkara Tahun ini	Keterangan
					Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	861	8181	17419	1006	457	549	0	0	394	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Misbah, M.H.  
NIP. 1971002.199603.1.001



Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.  
NIP. 19650209.199303.1.002

**LAPORAN LAYANAN POSBAKUM  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

No	Bulan	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah	Sisa	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Januari	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 8.332.000	Rp 8.332.000	719	
2	Februari	Rp 100.000.000	Rp 8.332.000	Rp 8.332.000	Rp 16.664.000	461	
3	Maret	Rp 100.000.000	Rp 16.664.000	Rp 8.332.000	Rp 24.996.000	501	
4	April	Rp 100.000.000	Rp 24.996.000	Rp 8.332.000	Rp 33.328.000	223	
5	Mei	Rp 100.000.000	Rp 33.328.000	Rp 8.332.000	Rp 41.660.000	757	
6	Juni	Rp 100.000.000	Rp 41.660.000	Rp 8.332.000	Rp 49.992.000	572	
7	Juli	Rp 100.000.000	Rp 49.992.000	Rp 8.332.000	Rp 58.324.000	545	
8	Agustus	Rp 100.000.000	Rp 58.324.000	Rp 8.332.000	Rp 66.656.000	705	
9	September	Rp 100.000.000	Rp 66.656.000	Rp 8.332.000	Rp 74.988.000	592	
10	Oktober	Rp 100.000.000	Rp 74.988.000	Rp 8.332.000	Rp 83.320.000	636	
11	November	Rp 100.000.000	Rp 83.320.000	Rp 8.332.000	Rp 91.652.000	526	
12	Desember	Rp 100.000.000	Rp 91.652.000	Rp 8.322.000	Rp 99.974.000	463	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 100.000.000</b>	<b>Rp 99.974.000</b>	<b>Rp 99.974.000</b>	<b>Rp 26.000</b>	<b>6700</b>	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



**Drs. H. Misbah M.H.I.**  
NIK. 197111002.1.09603.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Panitera,

**Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.**  
NIP. 19650209.199303.1.002

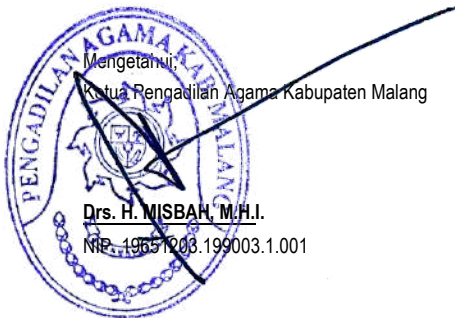


# DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DESEMBER TAHUN 2023


LAMPIRAN-10

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JABATAN	MASA KERJA SESUAI SK PANGKAT TERAKHIR					KENAIKAN YAD		TANGGAL	KETERANGAN
							PANGKAT	GOL	TMT	TH	BLN	PANGKAT	GAJI BERKALA	PENSIUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Drs. H. Misbah, M.H.I.	19651203.199003.1.001	L	Sumenep,	03-12-1965	Ketua / Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2023	31	1	01-04-2027	01-03-2024	01-01-2030	
2	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	19740807.199803.2.001	P	Surabaya,	07-08-1974	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2022	24	1	01-04-2026	01-03-2024	01-09-2039	
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	L	Gambut,	05-06-1961	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	31	1	01-04-2024	01-03-2023	01-07-2026	
4	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	L	Blitar,	05-01-1967	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	27	1	01-04-2023	01-03-2024	01-02-2032	
5	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	p	Sidoarjo,	15-03-1965	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2021	28	1	01-04-2025	01-03-2023	01-04-2030	
6	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	P	Blitar,	07-04-1970	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	28	1	01-04-2026	01-03-2024	01-05-2035	
7	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	L	Gresik,	25-09-1966	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	28	1	01-04-2026	01-03-2024	01-10-2031	
8	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	P	Amuntai,	07-10-1964	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	28	1	01-04-2023	01-03-2024	01-11-2029	
9	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	L	Subang,	03-08-1963	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2019	28	7	01-10-2023	01-03-2023	01-09-2028	
10	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	L	Gresik,	24-02-1961	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2022	28	7	01-10-2026	01-03-2024	01-03-2027	
11	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	L	Lamongan,	09-08-1968	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2021	28	10	01-04-2025	01-06-2024	01-09-2033	
12	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	19650209.199303.1.002	L	Blitar,	09-02-1965	Panitera	Pembina Tk. I	IV/b	01-10-2018	25	7	-	01-03-2023	01-03-2025	Pangkat Maksimal
13	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	19810825.200604.1.003	L	Kediri,	25-08-1981	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I	III/d	01-10-2023	12	6	01-10-2027	01-03-2023	01-09-2041	
14	Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	P	Tidore Kepulauan,	11-08-1969	Panitera Muda Permohonan	Penata	III/c	01-10-2021	23	0	01-10-2024	01-10-2023	01-09-2029	
15	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	P	Malang,	31-08-1985	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk. I	III/d	01-04-2023	12	0	01-04-2027	01-04-2023	01-09-2045	
16	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	L	Surabaya,	04-04-1975	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	01-10-2020	10	10	01-10-2024	01-12-2023	01-05-2033	
17	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	L	Sumenep,	18-07-1980	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pel	Penata Tk. I	III/d	01-04-2021	15	1	01-04-2025	01-03-2024	01-08-2038	
18	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	P	Lumajang,	11-04-1987	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Penata	III/c	01-10-2020	7	10	01-10-2024	01-12-2024	01-05-2045	
19	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	P	Tuban,	08-08-1969	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-10-2017	22	10	-	01-12-2024	01-09-2029	Pangkat Maksimal
20	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	L	Nganjuk,	08-08-1968	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-04-2009	12	0	-	01-03-2023	01-09-2028	Pangkat Maksimal
21	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	P	Blitar,	27-10-1966	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-10-2017	17	7	-	01-03-2024	01-11-2026	Pangkat Maksimal
22	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	P	Probolinggo,	08-07-1968	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2023	29	1	-	01-03-2024	01-08-2028	Pangkat Maksimal
23	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	L	Waingapu,	26-05-1965	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2014	16	1	-	01-03-2024	01-06-2025	Pangkat Maksimal
24	Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H.	19770619.200502.2.001	P	Pacitan,	19-06-1977	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-04-2022	12	1	01-04-2026	01-02-2024	01-07-2037	
25	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	L	Malang,	14-11-1978	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-10-2023	15	7	01-10-2027	01-03-2024	01-12-2038	
26	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	L	Malang,	19-12-1974	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	01-04-2020	15	6	01-04-2024	01-10-2024	01-01-2035	
27	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	P	Banyuwangi,	09-10-1978	Panitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2022	18	3	01-10-2022	01-07-2024	01-11-2038	
28	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.011	L	Bondowoso ,	26-09-1987	Panitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2020	7	9	01-10-2024	01-01-2023	01-10-2047	
29	Ismail, S.H., M.H.	19730303.201408.1.001	L	Malang,	03-03-1973	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	01-10-2020	20	9	01-10-2024	01-01-2024	01-04-2033	
30	Tomi Lustoro, S.H.	19870424.200604.1.003	L	Bandar Lampung,	24-04-1987	Panitera Pengganti	Penata Muda	III/a	01-04-2022	11	0	01-04-2026	01-04-2023	01-04-2047	
31	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	19660119.198703.1.001	L	Surabaya,	19-01-1966	Jurusita	Penata Tk. I	III/d	01-10-2021	26	7	01-10-2025	01-03-2023	01-02-2024	
32	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	P	Malang,	24-03-1987	ASDM Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2023	4	1	01-04-2027	01-03-2023	01-04-2045	
33	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	19940918.202012.2.007	P	Malang,	18-09-1994	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	01-07-2022	1	7	01-04-2025	01-12-2024	01-10-2052	
34	Mochammad Yoesuf, S.H.	19900503.202203.1.003	L	Malang,	03-05-1990	Klerak - Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-06-2048	

35	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak	19950714.202203.1.004	L	Jombang,	14-07-1995	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-08-2053	
36	Sindy Siska Silvana, S.H.	19960913.202203.2.016	P	Bantul,	13-09-1996	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	19-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-10-2054	
37	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	P	Sorong,	11-02-1999	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-03-2057	
38	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	L	Malang,	04-09-1969	Jurusita	Pengatur	III/c	01-10-2022	25	0	01-10-2022	01-10-2024	01-10-2027	
39	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	P	Malang,	23-12-1996	Jurusita Pengganti	Pengatur	III/c	03-01-2022	4	1	01-04-2025	01-12-2024	01-01-2055	
40	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	P	Malang,	13-02-1994	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	III/c	01-03-2022	4	0	01-04-2026	01-03-2024	01-03-2052	
41	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	L	Malang,	10-06-1994	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	III/c	01-03-2022	4	0	01-04-2026	01-03-2024	01-07-2052	
42	Nabila Ghina Nugraha, A.Md	19971118.202321.2.009	P	Tangerang,	18-11-1997	Arsiparis Pelaksana/Terampil	PPPK	VII	01-09-2023	-	-	-	01-09-2025	-	



Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

  
**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**DATA PEGAWAI PPNPN DIPA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 11**

NO	NAMA PEGAWAI	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
2	Beny Suprayogi	L	Jember,	20-10-1967	Satpam
3	Yulianto	L	Malang,	29-04-1986	Pramubakti
4	M. Imron	L	Sampang,	12-03-1975	Pramubakti
5	Muchamad Diki Fardiansyah, S.H.	L	Malang,	04-11-1989	Pramubakti
6	Muhabik Yusyafara	L	Malang,	08-07-1988	Pramubakti
7	Moh. Rizza Suryanatha, S.P., S.H.	L	Surabaya,	01-10-1980	Pramubakti
8	Neneng Kusriani	P	Sumenep,	31-10-1974	Pramubakti
9	Maulidin Alfa Hikmawan	L	Madiun,	25-12-1982	Pengemudi
10	Moh. Saezal D.P.P.	L	Madiun,	03-03-1988	Pramubakti
11	Trami Utari, S.H	P	Malang,	13-10-1990	Pramubakti
12	Masyhudi	L	Malang,	22-12-1970	Satpam
13	Slamet	L	Malang,	11-12-1973	Cleaning Service
14	Basori	L	Malang,	06-12-1994	Pramubakti
15	Dian Maulidah, S.H.	P	Malang,	19-10-1991	Pramubakti
16	Nanik Erma Nuraini	P	Malang,	19-07-1973	Pramubakti
17	Wahid Suryono, S.H.	L	Pamekasan,	26-02-1990	Pramubakti
18	Anas Makruf Maulidi, S.Kom.	L	Pamekasan,	04-09-1993	Pramubakti
19	Yudhianto Wijaya	L	Malang,	15-06-1981	Satpam
20	Imawati Mahmudah, S.H.	P	Malang,	15-04-1996	Pramubakti
21	Sundra Murti, S.Pd.	L	Probolinggo,	17-08-1993	Pramubakti

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**Drs. H. MISBAH, M.H.I.**  
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI  
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 12**

NO	N A M A	PANGKAT/ GOL. LAMA	PANGKAT/ GOL. BARU	MASA KERJA		TMT	SURAT KEPUTUSAN			KET.
				TAHUN	BULAN		SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	
1	Drs. Moh Jaenuri, S.H., M.H.	IV/c	IV/d	29	1	1 April 2023	PRESIDEN RI	00055/KEP/AA/15001/23	23 Februari 2023	Reguler
2	Dra. Istiani Farda	IV/c	IV/d	29	1	1 April 2023	PRESIDEN RI	00055/KEP/AA/15001/23	23 Februari 2023	Reguler
3	Hj. Mustiyah, S.H., M.H.	III/d	IV/a	29	1	1 April 2023	DIRJEN BADILAG MA RI	426/DjA/KP.04.1/SK/2/2023	21 Februari 2023	Reguler
4	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	III/c	III/d	12	0	1 April 2023	DIRJEN BADILAG MA RI	398/DjA/KP.04.1/SK/2/2023	28 Februari 2023	Reguler
5	Mia afriza Fajarwati, S.A.P	III/a	III/b	4	1	1 April 2023	PTA Surabaya	W13-A/1563/KP.04.1/SK/3/2023	13 Maret 2023	Reguler
6	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	III/a	III/b	4	1	1 April 2023	PTA Surabaya	W13-A/1391/KP.04.1/SK/3/2023	03 Maret 2023	Reguler
7	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	III/c	III/d	12	6	1 Oktober 2023	Ketua Mahkamah Agung RI	176/KMA/SK/IX/2023	4 September 2023	Reguler
8	Umar Tajudin, S.H.	III/c	III/d	15	7	1 Oktober 2023	Ketua Mahkamah Agung RI	176/KMA/SK/IX/2023	4 September 2023	Reguler
9	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	III/d	IV/a	14	6	1 Oktober 2023	Ketua Mahkamah Agung RI	176/KMA/SK/IX/2023	4 September 2023	Reguler



Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

  
**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002



**DATA PEGAWAI YANG KENAIKAN GAJI BERKALA  
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 13**

NO	N A M A	PANGKAT / GOL.	TMT KGB	MASA KERJA		SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	GAJI POKOK LAMA	GAJI POKOK BARU
				TAHUN	BULAN					
1	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.	III/c	01 Januari 2023	10	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/8021/KP.04.2/12/2022	01 Desember 2022	3.172.700	3.272.200
2	Sutik	II/c	01 Februari 2023	31	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/176/KP.04.2/1/2023	02 Januari 2023	3.444.600	3.553.100
3	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	IV/b	01 Maret 2023	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0896/KP.04.2/1/2023	27 Januari 2023	4.898.100	5.052.300
4	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	IV/d	01 Maret 2023	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0903/KP.04.2/1/2023	27 Januari 2023	5.321.200	5.488.800
5	Mastur Ali, S.H.	III/d	01 Maret 2023	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0897/KP.04.2/1/2023	27 Januari 2023	4.237.500	4.370.900
6	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.	IV/d	01 Maret 2023	32	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0904/KP.04.2/1/2023	27 Januari 2023	5.488.800	5.661.700
7	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	III/d	01 Maret 2023	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0899/KP.04.2/1/2023	27 Januari 2023	4.370.900	4.508.600
8	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	III/a	01 Maret 2023	4	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0900/KP.04.2/1/2023	27 Januari 2023	2.660.700	2.744.500
9	Rizky Ananda Putri, S.H.	III/a	01 Maret 2023	4	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0901/KP.04.2/1/2023	27 Januari 2023	2.660.700	2.744.500
10	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	III/d	01 April 2023	12	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/1587/KP.04.2/2/2023	28 Februari 2023	3.272.200	3.518.100
11	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	III/d	01 April 2023	14	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/1588/KP.04.2/2/2023	27 Februari 2023	3.518.100	3.628.900
12	Ahmad Rosyidi, S.H.	III/b	01 Mei 2023	14	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/2585/KP.04.2/4/2023	05 April 2023	3.238.300	3.340.300
13	Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H.	III/c	01 Oktober 2023	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	5462/KPA.W13-A35/KP.04.2/IX/2023	04 September 2023	4.065.500	4.193.500
14	Wiwini Sulistiyawati, S.H., M.H.	III/c	01 Oktober 2023	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	5463/KPA.W13-A35/KP.04.2/IX/2023	04 September 2023	4.065.500	4.193.500
15	Buyung Tumanggor, S.Kom.	III/d	01 Desember 2023	14	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	7151/KPA.W13-A35/KP.04.2/IX/2023	06 November 2023	3.518.100	3.628.900

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**Drs. H. MISBAH, M.H.**  
NIP. 196512031990031001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sek/etaris

**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 197504042009121002

**DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI MASUK PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 14**

NO.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN			KET.
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	IV/d	Pengadilan Agama Sragen Kelas IA	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	24/KMA/SK/II/2023	13 Februari 2023	23 Februari 2022	
2	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	19810825.200604.1.003	III/c	Pengadilan Agama Pasuruan Kelas IB	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Muda Permohonan	Panitera Muda Hukum	1015/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	08 Maret 2023	31 Maret 2023	
3	Tommi Lustoro, S.H.	19870424.200604.1.003	III/a	Pengadilan Agama Sampang Kelas IB	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	1020/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	08 Maret 2023	31 Maret 2023	
4	Drs. H. Misbah, M.H.I.	19651203.199003.1.001	IV/d	Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Ketua	Ketua	174/KMA/SK/IX/2023	04 September 2023	25 September 2023	
5	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	19770619.200502.2.001	III/d	Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	02 Oktober 2023	20 Oktober 2023	
6	Ismail, S.H., M.H.	19730303.201408.1.001	III/b	Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	02 Oktober 2023	20 Oktober 2023	



Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**Drs. H. MISBAH, M.H.I.**  
NIP. 19651203.199003.1.001

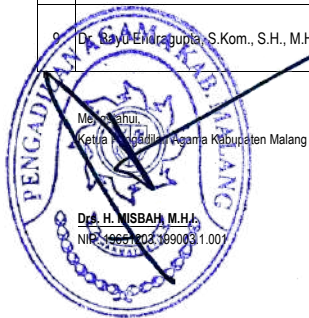
Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**DAFTAR PEGAWAI YANG PINDAH / MUTASI KELUAR TEMPAT BEKERJA  
PADA PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN 2023**

LAMPIRAN - 15

No.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN			KET.
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR SURAT	TANGGAL	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	IV/c	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Surabaya	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Ketua Pengadilan Agama Surabaya	174/KMA/SK/IX/2023	04 September 2023	25 September 2023	
2	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	IV/c	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Malang	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Hakim Pengadilan Agama Malang	174/KMA/SK/IX/2023	04 September 2023	08 September 2023	
6	Maulana Musa Sugi Alam, S.H.	19721021.199303.1.002	IV/b	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Tinggi Jayapura	Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura	644/SEK/SK.KP.1.2.5/VIII/2023	24 Agustus 2023	07 September 2023	
3	Widodo Supariyanto, S.H.I., M.H.	19710101.199703.1.012	IV/a	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Kota Kediri	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri	1014/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	8 Maret 2023	30 Maret 2023	
4	Homsiyah, S.H., M.H.	19660428.199012.2.001	IV/a	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Malang	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Malang	1008/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	8 Maret 2023	20 Maret 2023	
5	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	19940421.201903.2.012	III/b	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Pasuruan	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan	1227/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	8 Maret 2023	17 Maret 2023	
7	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320.201405.1.001	III/b	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Kraksaan	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kraksaan	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	2 Oktober 2023	23 Oktober 2023	
8	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	III/c	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Pasuruan	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	2 Oktober 2023	19 Oktober 2023	
9	Dr. Bayu Endangputra, S.Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	IV/a	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengadilan Agama Bojonegoro	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bojonegoro	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	2 Oktober 2023	23 Oktober 2023	



Kepanjen, 29 Desember 2023  
Pit. Sekretaris

*[Signature]*  
**BUPUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**DATA CUTI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 16**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LAMA CUTI	MULAI s/d SELESAI	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	09 s/d 11 Januari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
2	Rizky Ananda Putri, S.H.	19940421.201903.2.012	III/a	Analisis Perkara Peradilan	1 hari	04 Januari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
3	Wiwini Sulistiyawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	III/c	Panitera Pengganti	1 hari	16 Januari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
4	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	26 s/d 27 Januari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
5	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	II/c	CPNS Pengelola Perkara	1 hari	26 Januari 2023	Cuti Sakit	Sakit
6	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	27 Januari 2023	Cuti Sakit	Sakit
7	Drs. H. Badawi Asyari, S.H., M.H.	19650209.199303.1.002	IV/b	Panitera	2 hari	30 s/d 31 Januari 2023	Cuti Sakit	Sakit
8	Dra. Istiani Farda	19690414.199403.2.004	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	03 Februari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
9	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	III/d	Panitera Pengganti	3 hari	06 s/d 08 Februari 2023	Cuti Alasan Penting	Orang tua meninggal dunia
10	Maulana Musa Sugi Alam, S.H.	19721021.199303.1.002	IV/b	Sekretaris	1 hari	07 Februari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
11	Sutik	19650518.201405.1.001	II/c	Jurusita Pengganti	6 hari	03 s/d 10 Februari 2023	Cuti Sakit	Sakit
12	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	III/b	Panitera Pengganti	1 hari	16 Februari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
13	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	19601231.199403.1.027	IV/d	Hakim Utama Muda	5 hari	20 s/d 24 Februari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
14	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	III/d	Kasubbag PTIP	1 hari	23 Februari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
15	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	II/c	CPNS Pengelola Perkara	2 hari	20 s/d 21 Februari 2023	Cuti Sakit	Sakit
16	Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H.	19720404.199803.2.005	IV/a	Panitera Pengganti	1 hari	27 Februari 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
17	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	III/d	Kasubbag. Umum dan Keuangan	3 hari	02 s/d 06 Maret 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
18	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	24 Maret 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
19	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	24 Maret 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
20	Muhammad Arif Raihan Lubis, A.Md.	19940729.202203.1.011	III/a	Pengelola BMN	1 hari	09 Maret 2023	Cuti Sakit	Sakit
21	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	III/d	Panitera Pengganti	3 hari	15 s/d 17 Maret 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
22	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	1 hari	30 Maret 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
23	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	III/c	Panitera Pengganti	2 hari	30 s/d 31 Maret 2023	Cuti Alasan Penting	Mertua meninggal dunia
24	Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	26 s/d 28 April 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
25	Hanum Shirotu Nida S. Kom.	19940918.202012.2.007	III/a	Pranata Komputer	9 hari	17 April s/d 05 Mei 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
26	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	26 s/d 28 April 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
27	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	26 s/d 28 April 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
28	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.011	III/c	Panitera Pengganti	3 hari	26 s/d 28 April 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
29	Dr. H. Suhartono, S.Ag, S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	IV/c	Ketua/ Hakim Madya Utama	3 hari	26 s/d 28 April 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
30	Sindy Siska Silvana, S.H.	19950714.202203.1.004	III/a	Analisis Perkara Peradilan	3 hari	17 s/d 26 April 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
31	Dhimas Adityarahman P., S.Ak	19950714.202203.1.004	III/a	Analisis PEP	1 hari	19 Mei 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
32	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	IV/a	Panitera Pengganti	1 hari	16 Mei 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
33	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	II/d	Jurusita Pengganti	1 hari	19 Mei 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
34	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	19810825.200604.1.003	III/d	Panitera Muda Hukum	2 hari	26 s/d 29 Mei 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
35	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	IV/c	Hakim Madya Utama	4 hari	29 Mei s/d 05 Juni 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
36	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	III/d	Panitera Muda Gugatan	3 bulan	06 Juni s/d 05 September 2023	Cuti Melahirkan	Melahirkan anak ke-3
37	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	III/c	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	1 hari	22 Juni 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
38	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	III/c	Panitera Muda Permohonan	1 hari	21 Juli 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
39	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	18 Juli 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
40	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	28 Juli 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
41	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	III/c	Panitera Pengganti	1 hari	31 Juli 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
42	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	19740807.199803.2.001	IV/c	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	1 hari	14 Agustus 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
43	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	III/b	Analisis Kepegawaian Pertama	1 hari	1 Agustus 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
44	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	II/c	Pengelola Perkara	1 hari	4 Agustus 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
45	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	07 Agustus 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
46	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	04 September 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga



47	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	III/d	Panitera Pengganti	2 hari	13 s/d 14 September 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
48	Nabila Ghina Nugraha, A.Md	19971118.202321.2.009	VII	Arsiparis Pelaksana/Terampil	1 hari	20 September 2023	Cuti Sakit	Sakit
49	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	19770619.200502.2.001	III/d	Panitera Pengganti	2 hari	23 s/d 24 Oktober 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
50	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	II/c	Jurusita Pengganti	5 hari	30 Oktober 2023 s/d 03 November 2023	Cuti Alasan Penting	Menikah
51	Drs. H. Misbah, M.H.I.	19651203.199003.1.001	IV/d	Ketua/ Hakim Utama Muda	5 hari	30 Oktober 2023 s/d 03 November 2023	Cuti Alasan Penting	Bapak Mertua Meninggal Dunia
52	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	IV/d	Hakim Utama Muda	5 hari	08 s/d 14 November 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
53	Mochammad Yoesuf S.H.	19900503.202203.1.003	III/a	Analisis Perkara Peradilan	1 hari	14 November 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
54	Nabila Ghina Nugraha, A.Md	19971118.202321.2.009	II/c	PPPK Arsiparis Terampil/Pelaksana	1 hari	10 November 2023	Cuti Sakit	Sakit
55	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	19660119.198703.1.001	III/d	Jurusita	4 hari	14 s/d 17 November 2023	Cuti Sakit	Sakit
56	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	IV/a	Panitera Pengganti	1 hari	08 Desember 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
57	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	IV/a	Panitera Pengganti	2 hari	20 s/d 21 Desember 2023	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga



Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**Drs. H. MISBAN, M.H.I.**  
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjeri, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

  
**BUTUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**DAFTAR PEGAWAI YANG PROMOSI PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 17**

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	KET
				Dari	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	19710101.199703.1.012	IV/a	Dirjen Badilag	1014/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	8 Maret 2023	30 Maret 2023	Panmud Hukum promosi Panitera
2	Homsiyah, S.H., M.H.	19660428.199012.2.001	IV/a	Dirjen Badilag	1008/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	8 Maret 2023	20 Maret 2023	PP promosi Panmud Permohonan
3	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	19940421.201903.2.012	III/b	Dirjen Badilag	1227/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	8 Maret 2023	17 Maret 2023	APP promosi PP
4	Maulana Musa Sugi Alam, S.H.	19721021.199303.1.002	IV/b	Sekma RI	644/SEK/SK.KP.1.2.5/VIII/2023	24 Agustus 2023	07 September 2023	Sekretaris promosi Sek PT
5	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320.201405.1.001	III/b	KMA RI	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	2 Oktober 2023	23 Oktober 2023	PP promosi Panmud Permohonan
6	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	III/c	KMA RI	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	2 Oktober 2023	19 Oktober 2023	PP promosi Panmud Gugatan
7	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	IV/a	KMA RI	197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023	2 Oktober 2023	23 Oktober 2023	PP promosi Panmud Permohonan

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**Drs. H. MISBAH, M.H.I.**  
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH Pensiun PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 18**

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	Masa Kerja Golongan		KET
				Dari	Nomor	Tanggal		Tahun	Bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUTIK	19650518.201405.1.001	II/c	Sekretaris Mahkamah Agung RI	00037/13001/AV/05/23	3 Mei 2023	1 Juni 2023	31	4	



Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**Drs. H. MISBAH, M.H.I.**  
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

  
**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**DATA PELATIHAN / DIKLAT UNTUK TENAGA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 19**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN / DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023	PTA Surabaya	24 Mei 2023	Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
2	Hadjjah Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023	PTA Surabaya	24 Mei 2023	Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
3	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Mandiri E-Learning (05 s.d. 13 Juni 2023), Tatap Muka Klasikal (14 s.d.24 Juni 2023)	Satuan kerja masing-masing dan Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bogor
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
			Pemanggilan Peserta Tambahan Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Mandiri E-Learning (05 s.d. 13 Juni 2023), Tatap Muka Klasikal (14 s.d.24 Juni 2023)	Satuan kerja masing-masing dan Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bogor



4	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
5	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Bimbingan Teknis Implementasi Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur	Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	16 s.d. 18 Oktober 2023	Royal Hotel Jember Jl. Karimata No.50, Jember Jawa Timur.
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
6	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera	Character Building Biro Umum Mahkamah Agung RI	Biro Umum Mahkamah Agung RI	30 November s.d. 02 Desember 2023	Golden Tulip Holland Resort Batu, Jawa Timur.
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
7	Drs. H. Misbah, M.H.I.	Ketua	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
8	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing

			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
9	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
10	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
11	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
12	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
13	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing

14	Drs. A. Bashori, M.A.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
15	Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
16	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
17	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
18	Mastur Ali, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
		Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing

19	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
20	Hj. Mustiyah, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
21	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
22	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
23	Umar Tajudin, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
24	Zainul Fanani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing

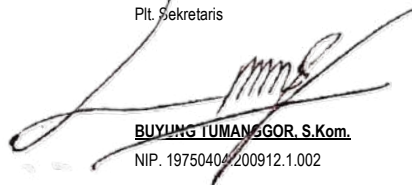


			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
25	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
26	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
27	Ismail, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
28	Tomi Lustoro, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
29	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	Jurusita	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing

30	Muhamad Alfian	Jurusita	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing
31	Venny Alvionita A.Md.	Jurusita Pengganti	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	22 September 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" secara online	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 Oktober 2023	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	24 November 2023	Satuan kerja masing-masing



Kepanjen, 29 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

  
**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404200912.1.002

**DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 20**

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL		KETERANGAN
1	Drs. H. Misbah, M.H.I.	19651203.199003.1.001	Ketua / Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
2	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	19740807.199803.2.001	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
4	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
5	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
6	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
7	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
8	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
9	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
10	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
11	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	
12	Drs. H. Badawi Asyari, S.H., M.H.	19650209.199303.1.002	Panitera	Pembina Tk. I	IV/b	
13	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	19810825.200604.1.003	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I	III/d	
14	Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	Panitera Muda Permohonan	Penata	III/c	
15	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk. I	III/d	
16	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	
17	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
18	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	
19	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	
20	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	
21	Yunita Eka Widayari, S.H., M.H.	19770619.200502.2.001	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
22	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
23	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	
24	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
25	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.011	Panitera Pengganti	Penata	III/c	

26	Ismail, S.H., M.H.	19730303.201408.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	
27	Tomi Lustoro, S.H.	19870424.200604.1.003	Panitera Pengganti	Penata Muda	III/a	
28	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	19660119.198703.1.001	Jurusita	Penata Tk. I	III/d	
29	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	Jurusita	Pengatur	II/c	
30	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/c	



Kepanjen, 29 Desember 2023

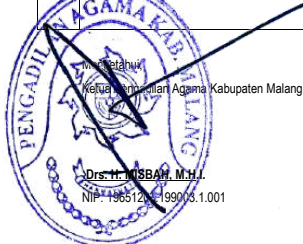
Plt. Sekretaris

**BUYUNG TRI MANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

DATA PELATIHAN/DIKLAT UNTUK TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

LAMPIRAN - 21

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN/DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	Mochammad Yoesuf, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Wilayah Jawa Timur Angkatan I secara Online dan Offline Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur	Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur	Online (30 Mei s.d. 9 Juni 2023), Offline/Tatap Muka (12 s.d.15 Juni 2023)	Satuan Kerja masing-masing dan BPSDM Provinsi Jawa Timur Jl. Kawi No.41 Barend Kiojen Kota Malang
			Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 Angkatan VIII	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Pembelajaran Mandiri (28 Juni s.d. 01 Juli 2023), Tatap Muka (03 s.d. 14 Juli 2023)	Satuan Kerja masing-masing dan Balitbang Kumdil MARI
2	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	Pengelola Perkara	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Level-1 Wilayah Jawa Timur Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan BPSDM Kementerian PUPR RI Tahun 2023	Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan BPSDM Kementerian PUPR RI Tahun 2023	Online (29 Mei s.d. 9 Juni 2023), Offline/Tatap Muka (13 s.d. 17 Juni 2023)	Satuan Kerja masing-masing dan Bapekom PUPR Wilayah VI Surabaya
3	Junaidi Syampurno, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pelatihan Online Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) Angkatan VII s.d IX dari Tempat Tugas tahun 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	12 s.d. 16 Juni 2023	Satuan Kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	28 s.d. 30 November 2023	Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya
4	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 Angkatan VII	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Pembelajaran Mandiri (28 Juni s.d. 01 Juli 2023), Tatap Muka (03 s.d. 14 Juli 2023)	Satuan Kerja masing-masing dan Balitbang Kumdil MARI
5	Sindy Siska Silvana, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 Angkatan IX	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Pembelajaran Mandiri (28 Juni s.d. 01 Juli 2023), Tatap Muka (03 s.d. 14 Juli 2023)	Satuan Kerja masing-masing dan Balitbang Kumdil MARI
6	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubbag.Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang	17 s.d. 18 Juli 2023	Hotel The 101 OJ, Jl. Dr. Cipto No.11 Celaket Malang
			Bimbingan Teknis Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	28 s.d. 30 November 2023	Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya
7	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian secara Online dari Tempat Tugas Angkatan 11	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	05 s.d. 09 September 2023 (Asynchronous) dan tanggal 11 s.d 18 September 2023 (Synchronous)	Satuan Kerja masing-masing dan Balitbang Kumdil MARI
8	Nabila Ghina Nugraha, A.Md.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (P3K) secara Blended Learning Tahun 2023 Angkatan III	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	25 September s.d. 13 Oktober 2023 (online dari tempat tugas) dan tanggal 17 s.d 26 Oktober 2023	Badan Litbang diklat Hukum dan Peradilan MA RI, Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor-Jawa Barat
9	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana	Bimbingan Teknis Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	28 s.d. 30 November 2023	Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya



Kepanjen, 29 Desember 2023  
 Ptt. Sekretaris  
  
**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
 NIP. 19750404.200912.1.002




**DATA TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**LAMPIRAN - 22**

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL		KETERANGAN
1	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	Plt. Sekretaris	Penata Tk.I	III/d	
2	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk.I	III/d	
3	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk.I	III/d	
4	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Penata	III/c	
5	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	
6	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	19940918.202012.2.007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	
7	Mochammad Yoesuf, S.H.	19900503.202203.1.003	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
8	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak	19950714.202203.1.004	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda	III/a	
9	Sindy Siska Silvana, S.H.	19960913.202203.2.016	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
10	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
11	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	
12	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



**Drs. H. MISBAH, M.H.I.**  
NIP. 19661203.199003.1.001

Kepanjen, 29 Desember 2023

Plt. Sekretaris



**BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002

**RINCIAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAMPIRAN 23**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 7.683.722.000	Rp 7.576.279.367	Rp 107.442.633	Terealisasi 98,60%

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



**Drs. H. Misbah, M.H.I.**  
NIP. 196512031990031.001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

**Buyung Tunanggor, S.kom.**  
NIP. 197504042009121002

**REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**LAMPIRAN 24**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 2.431.335.000	Rp 2.431.026.328	Rp 308.672	Terealisasi 99,99%

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



**Drs. H. Nisbah, M.H.I.**

NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2023

Plt. Sekretaris

**Buyung Tumanggor, S.kom.**

NIP. 19750404 200912 1 002

**REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAMPIRAN 25**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 200.000.000	Rp 199.500.100	Rp 499.900	Terealisasi 99,75%

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



**Drs. H. Mishah, M.H.I.**  
NIP. 19651201199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

**Buyung Tumanggor, S.kom.**  
NIP. 19750404 200912 1 002

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 604730 TAHUN 2023  
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**LAMPIRAN 26**

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1	Januari	Rp -	Rp -	
2	Pebruari	Rp -	Rp -	
3	Maret	Rp -	Rp -	
4	April	Rp -	Rp -	
5	Mei	Rp -	Rp -	
6	Juni	Rp -	Rp -	
7	Juli	Rp -	Rp -	
8	Agustus	Rp -	Rp -	
9	September	Rp -	Rp -	
10	Oktober	Rp -	Rp -	
11	Nopember	Rp -	Rp -	
12	Desember	Rp -	Rp -	
		Rp -	Rp -	NIHIL

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



**Drs. H. Misban, M.H.I.**

NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2023

Plt. Sekretaris

**Buyung Tumanggor, S.kom.**

NIP. 19750404 200912 1 002



**RINCIAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAMPIRAN 27**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604731)	Rp 165.800.000	Rp 164.834.000	Rp 966.000	Terealisasi 99,42%

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



**Drs. H. Misbah, M.H.I.**  
NIP. 19651201199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris


**Buyung Tumanggor, S.kom.**  
NIP. 19750404 200912 1 002

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 604731 TAHUN 2023  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**LAMPIRAN 28**

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1	Januari	Rp 75.105.000	Rp 75.105.000	
2	Pebruari	Rp 61.628.000	Rp 61.628.000	
3	Maret	Rp 65.880.000	Rp 65.880.000	
4	April	Rp 25.716.000	Rp 25.716.000	
5	Mei	Rp 79.022.000	Rp 79.022.000	
6	Juni	Rp 64.707.000	Rp 64.707.000	
7	Juli	Rp 66.442.000	Rp 66.442.000	
8	Agustus	Rp 66.204.000	Rp 66.204.000	
9	September	Rp 62.104.500	Rp 62.104.500	
10	Oktober	Rp 70.534.000	Rp 70.534.000	
11	Nopember	Rp 63.178.000	Rp 63.178.000	
12	Desember	Rp 36.090.500	Rp 36.090.500	
		Rp 736.611.000	Rp 736.611.000	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



**Drs. H. Misbah, M.H.I.**  
NIP. 19651003-199003-1-001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris



**Buyung Tunanggor, S.kom.**  
NIP. 19750404 200912 1 002

**DATA KENDARAAN DINAS  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2021**

**Lampiran 30**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Pemegang SIP	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
<b>I</b>	<b>Kendaraan Roda 4</b>						
1	Sedan	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Timor
2	Station Wagon	2015	V			Ketua	Kijang Innova
3	Station Wagon	2009	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kijang Innova
4	Station Wagon	2011	V			Panitera	Avanza
5	Station Wagon	2021	V			Ketua	Kijang Innova (Pinjam Pakai Dari Mahkamah Agung)
6	Station Wagon	2015	V			Wakil Ketua	Kijang Innova (Pinjam Pakai Dari Pemkab. Malang)
<b>II</b>	<b>Kendaraan Roda 2</b>						
1	Binter	1999			V		Rusak Berat
2	Honda grand	1999			V		Rusak Berat
3	Win	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kendaraan Operasional
4	Shogun	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kendaraan Operasional
5	Supra X	2006	V			Wakil Ketua	Kendaraan Operasional
6	Supra X	2006	V			Panitera	Kendaraan Operasional
7	Mega Pro	2008	V			Junaidi Syampurno, S.H.	Kendaraan Operasional
8	Mega Pro	2008	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kendaraan Operasional
9	Mega Pro	2008	V			Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	Kendaraan Operasional

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,  
  
Drs. H. Misbah, M.H.I.  
NIP. 19651213 199003 1 001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

Buyung Tumanggol, S.kom.  
NIP. 19750404 200912 1 002

**DATA SARANA PRASARANA  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

**Lampiran 29**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
<b>I</b>	<b>Ruangan</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris	1	
5	Ruang Wakil Panitera	1	
6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Sekretariat	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang Hakim	1	
10	Ruang Rapat Pimpinan	1	
11	Ruang Sidang Utama	1	
12	Ruang Sidang I	1	
13	Ruang Sidang II	1	
14	Ruang Sidang III	1	
15	Ruang Pendaftaran	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Arsip	1	
18	Ruang IT	1	
19	Ruang Tunggu Dalam	1	
20	Ruang Tunggu Luar	1	
21	Ruang Loby LT.1	1	
22	Ruang Loby LT.2	1	
23	Ruang Mediasi	1	
24	Gedung LT 1	1	
25	Gedung LT 2	1	
	<b>Fasilitas Perkantoran</b>		
<b>II</b>	<b>Komputer</b>		

1	P.C Unit	32	
2	Laptop	10	
3	Printer	35	
4	Scanner	1	
5	Proyektor	2	
6	AC	13	
7	Faximile	1	
8	Genset	1	
9	Televisi	4	

Kepanjen, 31 Desember 2023

Mengetahui,  
Plt. Sekretaris



**Buyung Tumanggor, S.Kom.**  
NIP 19750404 200912 1 002



**DATA RUMAH DINAS  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

**Lampiran 29**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					NIHIL
1	Ketua					NIHIL
2	Wakil Ketua					NIHIL
3	Hakim					NIHIL
4	Panitera					NIHIL
5	Sekretaris					NIHIL

Kepanjen, 31 Desember 2021

Mengetahui,  
Plt. Sekretaris



**Buyung Tumanggor, S.Kom.**  
NIP. 19750404 200912 1 002

**DATA KENDARAAN DINAS  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2021**

**Lampiran 30**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Pemegang SIP	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
<b>I</b>	<b>Kendaraan Roda 4</b>						
1	Sedan	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Timor
2	Station Wagon	2015	V			Ketua	Kijang Innova
3	Station Wagon	2009	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kijang Innova
4	Station Wagon	2011	V			Panitera	Avanza
5	Station Wagon	2021	V			Ketua	Kijang Innova (Pinjam Pakai Dari Pemkab. Malang)
6	Station Wagon	2015	V			Wakil Ketua	Kijang Innova (Pinjam Pakai Dari Pemkab. Malang)
<b>II</b>	<b>Kendaraan Roda 2</b>						
1	Binter	1999			V		Rusak Berat
2	Honda grand	1999			V		Rusak Berat
3	Win	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kendaraan Operasional
4	Shogun	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kendaraan Operasional
5	Supra X	2006	V			Wakil Ketua	Kendaraan Operasional
6	Supra X	2006	V			Panitera	Kendaraan Operasional
7	Mega Pro	2008	V			Junaidi Syampurno, S.H.	Kendaraan Operasional
8	Mega Pro	2008	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kendaraan Operasional
9	Mega Pro	2008	V			Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	Kendaraan Operasional

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,  
  
Drs. H. Misbah, M.H.I.  
NIP. 19651203 199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

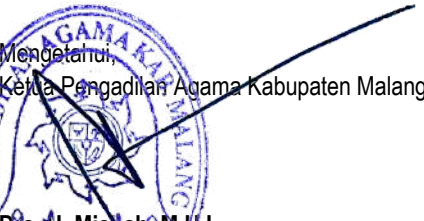
Buyung Tumanggor, S.kom.  
NIP. 19750404 200912 1 002

**JUMLAH SURAT MASUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023**

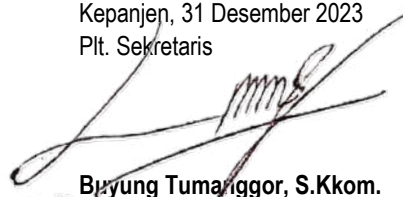
**LAMPIRAN 31**

NO	KODE SURAT	J A N U A R I	P E B R U A R I	M A R E T	A P R I L	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U S	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D E S E M B E R	KET	JUMLAH
1	OT	5	6	5	14	1	32	1	2	2	1	2	3		74
2	HM	2	20	11	12	6	13	12	15	2	5	10	11		119
3	KP	3	13	9	5	4	8	6	3	6	0	6	5		68
4	KU	3	2	3	1	2	1	5	0	1	2	0	1		21
5	KS	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0		4
6	PL	2	3	2	0	0	0	2	0	1	0	1	3		14
7	HK	250	201	102	302	120	203	302	154	232	545	425	189		3025
8	PP	4	8	5	7	2	5	2	2	4	10	1	4		54
9	PB	0	0	9	3	1	9	3	0	0	0	0	0		25
10	PS	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0		5
11	SK	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0		7
	<b>JUMLAH</b>	<b>271</b>	<b>255</b>	<b>149</b>	<b>344</b>	<b>136</b>	<b>272</b>	<b>337</b>	<b>176</b>	<b>251</b>	<b>564</b>	<b>445</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>3416</b>

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

  
Drs. H. Missah, M.H.I.  
NIP. 19651205 199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

  
Buyung Tumanggor, S.Kkom.  
NIP. 19750404 200912 1 002

**JUMLAH SURAT KELUAR BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023**

**LAMPIRAN 32**

NO	KODE SURAT	J A N U A R I	P E B R U A R I	M A R E T	A P R I L	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U S	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D E S E M B E R	KET	JUMLAH
1	OT	10	21	12	3	5	1	20	13	3	6	2	8		104
2	HM	11	12	18	7	7	2	12	2	9	4	0	2		86
3	KP	110	60	50	26	210	110	2	147	140	102	120	110		1187
4	KU	19	21	60	9	14	13	6	9	81	26	20	37		315
5	KS	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0		5
6	PL	0	1	3	0	5	7	7	2	3	13	0	22		63
7	HK	605	201	345	445	652	506	604	526	707	405	863	465		6324
8	PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9		11
9	PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	PS	3	1	1	0	0	0	3	2	0	1	1	0		12
	<b>JUMLAH</b>	<b>758</b>	<b>317</b>	<b>490</b>	<b>491</b>	<b>893</b>	<b>639</b>	<b>654</b>	<b>701</b>	<b>945</b>	<b>557</b>	<b>1009</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>8107</b>



Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**Drs. H. Misbah, M.H.I.**  
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris

  
**Buyung Tumanggor, S.Kom.**  
NIP. 19750404.200912.1.002